

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**



**2019**



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI**

Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah  
Kode Pos 36139 Telp. 0741-573432 Fax. 0741-571525

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 339) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Semoga Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP KKP Kelas III Jambi, dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya, *wallahu 'alam.*

Jambi, Januari 2020

Kepala KKP Jambi,



**Ali Isha Wardhana, SKM., MKM**  
NIP 196901271993031001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan kinerja sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dilengkapi data pengukuran indikator kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sarannya. Realisasi Keuangan KKP Kelas III Jambi tahun 2019 dan LAKIP sub bagian dan seksi-seksi merupakan sumber data penyusunan LAKIP KKP Kelas III Jambi. Laporan kinerja tertuang dalam indikator kinerja kegiatan KKP Kelas III Jambi.

Analisis Kinerja yang digunakan yaitu analisis kinerja dari tiap sasaran strategis, bermaksud untuk mengetahui kinerja kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis baik parsial maupun komprehensif. Capaian sasaran strategis 2019 (komprehensif) dihitung menggunakan rerata dari kumulasi persentase capaian semua sasaran strategisnya.

Evaluasi diri (*self assessment*) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2019 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 115,60%, berkategori baik, dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 97,74%, juga berkategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 118,70%, maka pada tahun 2019 ini capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 3,1%, hal ini karena jumlah pasien umroh dan penumpang pesawat yang dikeluarkan surat izin layak terbang, serta jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya menurun. Untuk tahun 2019 ini, pada dasarnya masih ada perbedaan antara realisasi fisik dan keuangan, dan salah satu penyebabnya adalah pencapaian beberapa *breakdown* Indikator Kinerja Kegiatan, seperti penerbitan dokumen, yang tidak mendapat asupan anggaran (tetap dilaksanakan karena merupakan tupoksi), dan pencapaiannya fisiknya lebih dari yang ditargetkan, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan antara realisasi anggaran dan realisasi fisik indikator kinerja kegiatan.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Isu Strategis .....	2
C. Visi dan Misi .....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Sumber Daya Manusia .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Perencanaan Kinerja .....	14
B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Realisasi Anggaran.....	83
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Tindak Lanjut.....	100

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Jarak Tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	3
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	8
Tabel 3.	Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	9
Tabel 4.	Distribusi Pegawai Menurut Jabatan (Struktural dan Fungsional) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	10
Tabel 5.	Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2015 – 2019.....	17
Tabel 6.	Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Keseragaman bagi KKP se-Indonesia.....	18
Tabel 7.	Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KKP Kelas III Jambi Tahun 2019.....	18
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	21
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Berdasarkan Output RKAKL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	22
Tabel 10.	Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.....	21
Tabel 11.	Capaian Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekearifan Kesehatan Tahun 2019.....	24
Tabel 12.	Capaian Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019.....	30
Tabel 13.	Capaian Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019.....	30
Tabel 14.	Target, realisasi dan jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2019.....	41
Tabel 15.	Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2019.....	41
Tabel 16.	Capaian Indikator Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan.....	51
Tabel 17.	Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.....	51
Tabel 18.	Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.....	62
Tabel 19.	Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2019 Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P Tahun 2019.....	76
Tabel 20.	Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P Tahun 2019.....	80
Tabel 21.	Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2019.....	83
Tabel 22.	Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	84

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	84
Tabel 24. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019 Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	85
Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	85
Tabel 26. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	86
Tabel 27. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019 Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	86
Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	86
Tabel 29. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	87
Tabel 30. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Tahun 2015 – 2018 Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	87
Tabel 31. Pagu dan realisasi anggaran Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	88
Tabel 32. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	88
Tabel 33. Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2014–2019 Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	89
Tabel 34. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	89
Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	89
Tabel 36. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	90
Tabel 37. Pagu dan realisasi anggaran Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	90
Tabel 38. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	91
Tabel 39. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2014–2019 Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	91
Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	92
Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	92
Tabel 42. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2014-2019 Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	93
Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	93
Tabel 44. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	93
Tabel 45. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2014-2019 Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	94
Tabel 46. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	94



Tabel 47. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	94
Tabel 48. Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2015– 2019 Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	95
Tabel 49. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	95
Tabel 50. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	95
Tabel 51. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	96
Tabel 52. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	96
Tabel 53. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	97
Tabel 54. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	98
Tabel 55. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	98
Tabel 56. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019.....	98
Tabel 57. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi .....	98



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Persentase Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2019 .....	8
Grafik 2.	Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut golongan dan ruang Tahun 2019 .....	9
Grafik 3.	Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019 .....	10
Grafik 4.	Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2019 .....	11
Grafik 5.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaankesehatan Tahun 2019 .....	26
Grafik 6.	Tren Penerbitan dokumen PHQC dari tahun 2015-2019 .....	26
Grafik 7.	Tren Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC Tahun 2015 s.d. Tahun 2019 .....	27
Grafik 8.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan Tahun 2019 dengan RPJMN 2019 .....	28
Grafik 9.	Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekarantina Kesehatan dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	28
Grafik 10.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019 .....	31
Grafik 11.	Perbandingan realisasi indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019 .....	31
Grafik 12.	Tren Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Kelas III Jambi Tahun 2015-2019 .....	32
Grafik 13.	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	33
Grafik 14.	Capaian indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019 .....	37
Grafik 15.	Tren Indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2015-2019 .....	37
Grafik 16.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019 .....	37
Grafik 17.	Perbandingan Realisasi indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	38
Grafik 18.	Trend Perbandingan jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 2015 s.d. 2019 .....	43
Grafik 19.	Perbandingan realisasi indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus Tahun 2019 dengan RPJMN 2019 .....	43
Grafik 20.	Perbandingan Realisasi jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	46
Grafik 21.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2019 .....	47

Grafik 22.	Tren Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2015-2019.....	47
Grafik 23.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019.....	48
Grafik 24.	Perbandingan realisasi indikator 5 KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019.....	48
Grafik 25.	Perbandingan target dan realisasi indikator Indikator Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan tahun 2019 .....	52
Grafik 26.	Trend Capaian persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah tahun 2015 s.d 2019.....	53
Grafik 27.	Perbandingan Realisasi persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	55
Grafik 28.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi tahun 2019 .....	58
Grafik 29.	Trend Capaian persentase Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi tahun 2018 s.d 2019.....	56
Grafik 30.	Perbandingan Realisasi Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019 .....	57
Grafik 31.	Perbandingan realisasi indikator jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019.....	58
Grafik 32.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area Tahun 2019.....	68
Grafik 33.	Trend Capaian persentase Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2018 s.d 2019.....	69
Grafik 34.	Perbandingan Realisasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2019 .....	64
Grafik 35.	Perbandingan realisasi indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019 .....	64
Grafik 36.	Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung tahun 2019 .....	67
Grafik 37.	Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung tahun 2018 dan 2019.....	68
Grafik 38.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung Tahun 2019 dengan RPJMN Tahun 2019.....	68
Grafik 39.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan instansi sejenis tahun 2019 .....	69
Grafik 40.	Perbandingan Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d. 2019 .....	73
Grafik 41.	Perbandingan realisasi indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019.....	74
Grafik 42.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P Tahun 2019 .....	77



Grafik 43. Perbandingan Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P Tahun 2018 s.d. 2019 .....	77
Grafik 44. Perbandingan realisasi indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019 .....	78
Grafik 45. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2019 .....	81
Grafik 46. Perbandingan Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019 ...	81
Grafik 47. Perbandingan realisasi indikator sarana dan prasarana KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi ..... 1

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2018 .....7

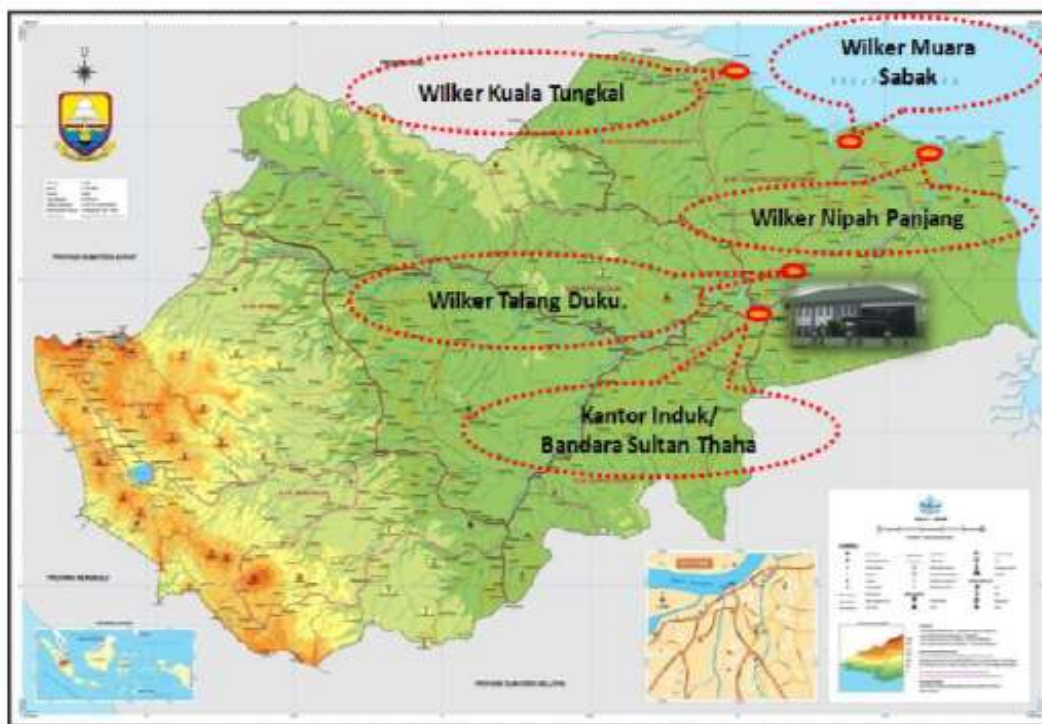
## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2019
- Lampiran 2. Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2019
- Lampiran 3. SK Tim Penyusun LAKIP KKP Kelas III Jambi Tahun 2019

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terletak di Provinsi Jambi dan beralamat di jalan raya MTQ no. 2 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi memiliki 6 (enam) wilayah kerja dengan perincian 5 (lima) wilayah kerja adalah pelabuhan laut dan sungai serta 1 (satu) wilayah kerja bandar udara, yang mana wilayah kerja tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Deskripsi jarak tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jarak Tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

No	Wilker	KKP	Uraian	Jarak (KM)
1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	Induk	Berada di Kota Jambi berdekatan dengan Bandara Sultan Thaha Jambi	0
2	Bandara Sultan Thaha Jambi	Wilker	Berada di Kota Jambi Kecamatan Paal Merah, merupakan Pelabuhan udara yang melayani penerbangan dalam negeri (domestik) dan berdekatan dengan kantor induk	± 0,5
3	Pelabuhan Jambi	Wilker	Berada di Kota Jambi, yaitu wilayah aliran sungai Batanghari bertepatan pada wilayah seberang Jambi dan pusat pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi	7,1
4	Pelabuhan Talang Duku	Wilker	Pelabuhan Talang Duku berada di Desa Talang Duku, berada di tepi sungai Batanghari, dengan jarak ± 7,5 mil laut dari Pelabuhan Jambi	12
5	Pelabuhan Muara Sabak	Wilker	berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, letaknya berdekatan dengan muara sungai Batanghari. Kurang lebih 5,5 mil laut dari <i>offshore</i> (ambang luar).	75,5
6	Pelabuhan Kuala Tungkal	Wilker	berada di ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terletak di Muara Sungai Pengabuan	126
7	Pelabuhan Nipah Panjang	Wilker	Berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terletak di tepi sungai Lokan, yang merupakan tepi sungai Batang Hari dengan Jarak ≠ 7,5 mil laut dari Pelabuhan Laut	129,5

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak tempuh terjauh dari kantor induk ke wilayah kerja (wilker) adalah wilker Pelabuhan Nipah Panjang dan terdekat adalah Bandara Sultan Thaha Jambi.

## B. Isu Strategis

Kementerian Kesehatan memiliki tiga isu strategis kesehatan yang menjadi sorotan publik pada tahun 2019 yakni; 1) Percepatan eliminasi Tuberkulosis dengan fokus pada *missing cases*, kepatuhan berobat dan TBC MDR; 2) Penurunan stunting dengan fokus pada pencegahan dan intervensi; dan 3) Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dengan fokus pada peningkatan cakupan, peningkatan mutu dan penguatan surveilans. Dari ketiga isu tersebut, Ditjen P2P telah melakukan intervensi untuk penanganan isu tersebut khususnya TBC dan imunisasi. Hasil studi inventori TBC yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan



menemukan bahwa angka *Under-Reporting (Missing Cases)* secara nasional sebesar 41%, dengan proporsi terbanyak pada klinik swasta, Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Rumah Sakit dimana kasus *missing cases* terbanyak terjadi pada kasus TBC anak dan kasus TBC *extra pulmonary*. Penyebaran penyakit Tuberkulosis di Indonesia sangat luas dan menyebabkan kematian. Menurut laporan *Global Report*, 2018, angka kejadian (insidensi) TBC tahun 2017 adalah 319 per100.000 (sekitar 842.000 pasien TBC), dan 4% diantaranya dengan TBC/HIV. Angka kematian TBC adalah 40 per 100.000 penduduk dimana angka tersebut tidak termasuk angka kematian akibat TB/HIV.

Selain TB dan imunisasi, penyakit menular lainnya masih merupakan tantangan antara lain penyakit HIV AIDS, Malaria dan Filariasis sehingga menjadi Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan. Secara global, diestimasikan ada 36,7 juta Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) pada tahun 2015. Selain itu diperkirakan 2,1 juta infeksi baru dan 1,1 juta kematian dikaitkan dengan AIDS setiap tahunnya. Berdasarkan laporan WHO regional Asia Pasifik tahun 2016, jumlah ODHA di wilayah Asia Pasifik mencapai 3,5 juta orang di tahun 2015, merupakan jumlah terbanyak setelah wilayah sub-sahara Afrika. Indonesia termasuk salah satu negara bersama Myanmar, Nepal dan Thailand yang memiliki jumlah ODHA terbesar setelah India di Asia Pasifik. Diperkirakan 39% ODHA di Asia Pasifik terkonsentrasi di negara-negara tersebut dan 60% berada di India. Situasi epidemi HIV AIDS di Indonesia sampai dengan tahun 2016 masih terkonsentrasi pada populasi kunci dengan penyebaran kasus HIV AIDS di 419 (81,5%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS Kementerian Kesehatan hingga September tahun 2018 diketahui bahwa jumlah kumulatif kasus HIV yang ditemukan sebesar 314.143 kasus, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sebanyak 111.973 orang.

Selain penyakit menular yang sifatnya *emerging* dan *re-emerging diseases* perlu juga diwaspadai dengan adanya ancaman penyakit berpotensi wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat (PHEIC) seperti Mers Cov, SARS, avian influenza, cemaran bahan berbahaya seperti radiasi nuklir dimana penyakit tersebut bisa datang dari luar negeri maupun berasal dari negara kita sendiri. Ancaman kejadian tersebut sulit kita perkirakan karena mobilisasi yang tinggi melalui pintu masuk negara. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka KKP sebagai penanggung jawab di pintu masuk harus selalu waspada terhadap adanya ancaman penyakit PHEIC.

### C. Visi dan Misi

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga Menyusun

Rencana Strategis (Renstra) periode 5 (Lima) tahun. Kementerian Kesehatan telah menyusun Renstra periode 5 (Lima) tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Visi, Misi dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tidak menggunakan visi misi namun mengikuti Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang telah disusun sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan

Visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 perubahan dari Permenkes sebelumnya Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

## E. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor: 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang dipimpin oleh seorang kepala dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah, mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan

- teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
4. Instalasi, merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi.
  5. Wilayah Kerja, merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP terdiri dari 6 wilayah kerja, yakni.
    - a. Wilayah Kerja Bandara Sultan Thaha
    - b. Wilayah Kerja Pelabuhan Jambi
    - c. Wilayah Kerja Pelabuhan Talang Duku
    - d. Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Sabak
    - e. Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Tungkal
    - f. Wilayah Kerja Pelabuhan Nipah Panjang
  6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi KKP Kelas III Jambi Tahun 2019 :



Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

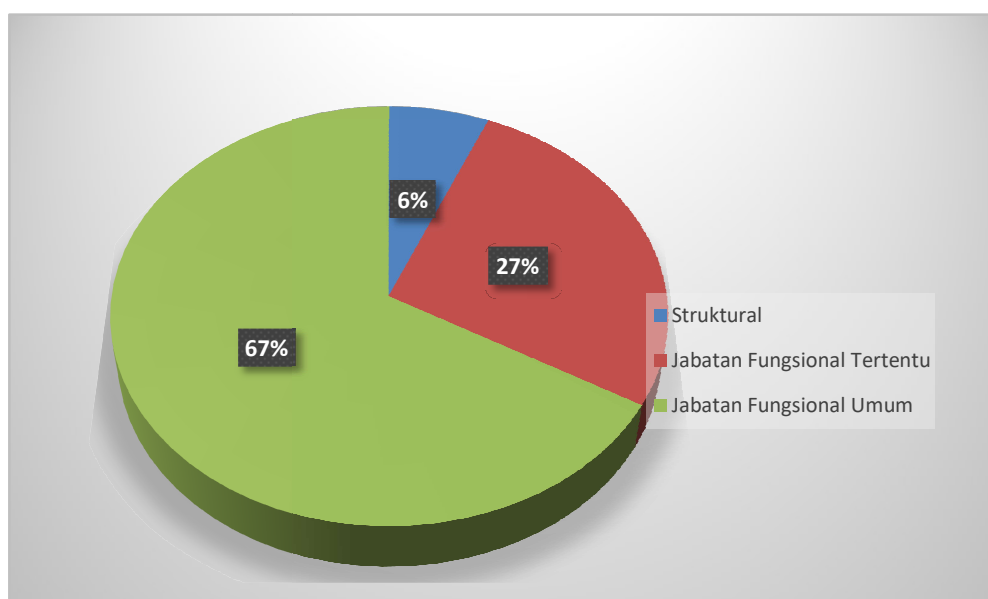
## F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran merupakan elemen yang memegang peran penting untuk mencapai kinerja dalam suatu organisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hingga periode Desember 2019 jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia

#### a. Menurut Jabatan

- 1) Jabatan Struktural : 4 orang
- 2) Jabatan Fungsional Tertentu : 17 orang
- 3) Jabatan Fungsional Umum : 42 orang

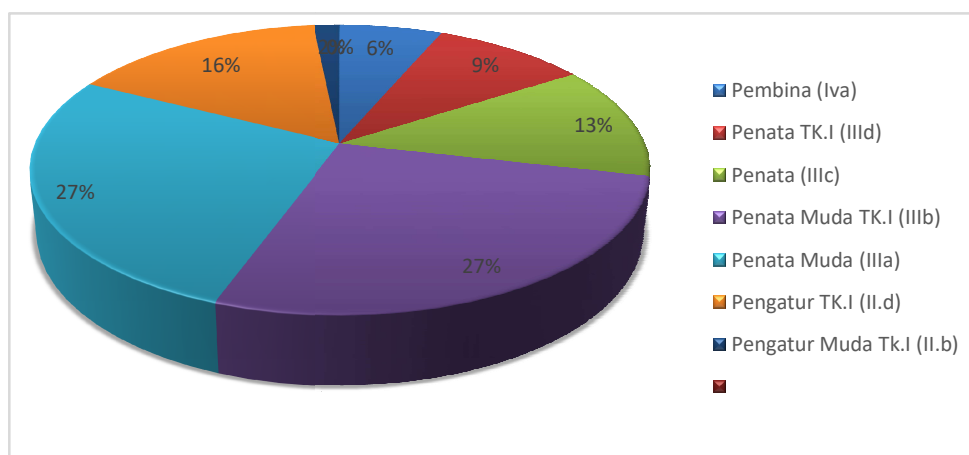


Grafik 1. Persentase Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2019

#### b. Menurut Golongan dan ruang

Tabel 2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
IV	4	-	-	-	4
III	17	17	8	6	48
II	-	1	-	10	11
Jumlah	21	18	8	16	63

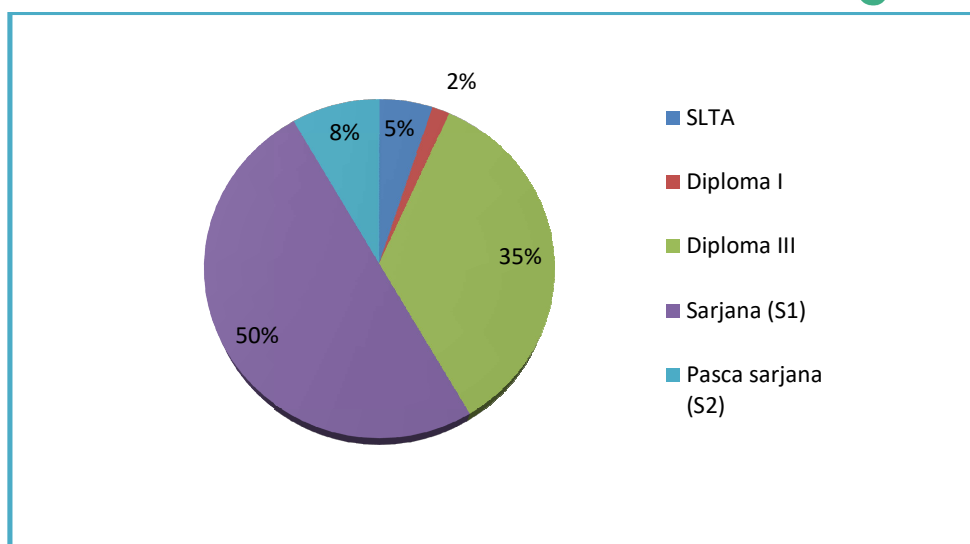


Grafik 2. Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut golongan dan ruang Tahun 2019

c. Menurut Tingkat pendidikan.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

No	Kualifikasi Pendidikan	JFU	JFT	Struktural	Jumlah
1.	S2 Kesehatan Masyarakat	1	2	2	5
2.	S2 Epidemiologi			1	1
3.	S2 Manajemen	2			2
4.	S2 Hukum	1			1
5.	Dokter	3	2		5
6.	S1 Kesehatan Masyarakat	6	11	1	18
7.	S1 Keperawatan	4			4
8.	S1 Komputer	1			1
9.	S1 Administrasi publik		1		1
10.	D III Kesehatan Lingkungan	6			6
11.	D III Keperawatan	7	1		8
12.	D III Farmasi	2			2
13.	D III Analisis Kesehatan	2			2
14.	D III Akuntansi	1			1
15.	D III Komputer	1			1
16.	DI SPPH	1			1
17.	SMA / Sederajat	4			4
Jumlah		42	17	4	63



Grafik 3. Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

d. Menurut Jabatan Fungsional

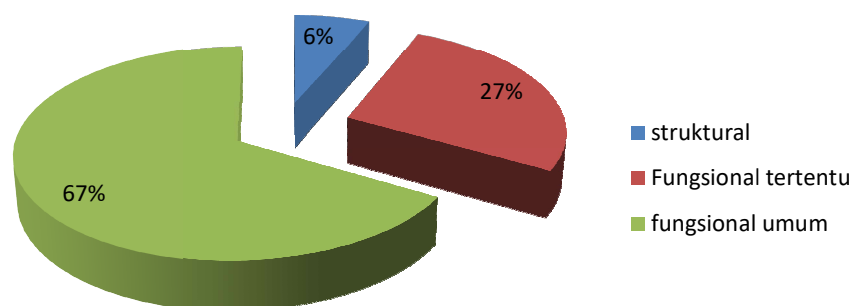
Hingga periode Desember 2019, distribusi pegawai berdasarkan jabatan baik struktural maupun fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan (Struktural dan Fungsional) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

No	Kualifikasi Pendidikan	TU	PRL dan KLW				PKSE		Struktural	Jumlah	
			PRL		KLW		JFU	JFT		JFU	JFT
			JFU	JFT	JFU	JFT					
1.	S2 Kesehatan Masyarakat		1					2	1	2	
2.	S2 Entomologi Kesehatan			2							
3.	S2 Epidemiologi							1			
4.	S2 Manajemen	1					1		2		
5.	S2 Hukum	1							1		
6.	Dokter				2	2	1		3	2	
7.	S1 Kesehatan Masyarakat	1	3	7	1		1	4	1	11	
8.	S1 Keperawatan				3		1		4		
9.	S1 Komputer	1							1		
10.	S1 Administrasi publik			1						1	
11.	D III Kesehatan Lingkungan		6						6		
12.	D III Keperawatan	1			2	1	4		7	1	
13.	D III Farmasi				2				2		



No	Kualifikasi Pendidikan	TU	PRL dan KLW				PKSE		Struktural	Jumlah	
			PRL		KLW		JFU	JFT		JFU	JFT
			JFU	JFT	JFU	JFT					
14.	D III Analis Kesehatan				2					2	
15.	D III Akuntansi	1								1	
16.	D III Komputer	1								1	
17.	D I SPPH		1							1	
18.	SMA / Sederajat	4								4	
<b>Jumlah</b>		11	11	10	12	3	8	4	4	42	17



Grafik 4. Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2019

## G. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Pada dasarnya laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi selama Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka fikir seperti

itu, sistematika penyajian laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan uraian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dan tingkat pencapaiannya. Disamping itu disebutkan pula kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan ditahun berikutnya.

3. Daftar Isi

4. Daftar Grafik

5. Daftar tabel

6. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang visi misi, latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

7. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun 2019, meliputi :

A. Perencanaan Kinerja

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan 2015–2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

B. Perjanjian kinerja

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

8. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang di dalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat mendukung, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil. Pada bab ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

9. Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

10. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan KKP Kelas III Jambi tahun 2019 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Jambi Tahun 2015-2019 yang telah dilakukan revisi pada bulan Januari 2019. Sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2019 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAK revisi KKP Kelas III Jambi Tahun 2015-2019.

#### **Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Jambi Tahun 2015 – 2019**

Dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran pokok untuk pembangunan kesehatan yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (3) meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (4) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (5) perlindungan anak; dan (6) pembangunan masyarakat. Sasaran pokok dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular meliputi menurunnya prevalensi TB, prevalensi HIV, prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi obesitas dan prevalensi merokok.

Sasaran pokok ini kemudian diturunkan dalam sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 revisi. Sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan untuk Ditjen P2P adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan sasaran yang akan dicapai sebagaiberikut:

1. Persentase Cakupan Keberhasilan pengobatan pasien TB/*Succes Rate* (SR) sebesar 90%.
2. Prevalensi HIV sebesar <0,5 persen.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi Malaria sebanyak 300 kabupaten/kota.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta sebanyak 34 provinsi.



5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis sebanyak 35 Kabupaten/Kota.
6. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
7. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
8. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah sebesar 50%.
9. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 280 kab/kota.

Sasaran strategis Renstra revisi Kementerian Kesehatan tersebut kemudian diturunkan dalam RAP revisi tahun 2015-2019 dengan penyesuaian pada tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. Sasaran tersebut adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa, yang ditandai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yakni:

1. Persentase Cakupan Keberhasilan pengobatan pasien TB/Succes Rate (SR) sebesar 90%.
2. Prevalensi HIV sebesar <0,5 persen.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi Malaria sebanyak 300 kabupaten/kota.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta sebanyak 34 provinsi.
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis sebanyak 35 Kabupaten/Kota.
6. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
7. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
8. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah sebesar 50%.
9. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 280 kab/kota.
10. Persentase respon terhadap signal SKD KLB dan bencana di wilayah layanan B/BTKLPP.
11. Persentase Teknologi Tepat Guna P2P yang dihasilkan B/BTKLPP meningkat 50% dari jumlah TTG tahun 2014.
12. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Sasaran strategis Renstra revisi Ditjen P2P tersebut kemudian di turunkan menjadi RAK KKP Kelas III Jambi tahun 2015-2019 dengan penyesuaian pada tugas pokok dan fungsi KKP Kelas III Jambi. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
3. Menurunnya penyakit menular langsung
4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran tersebut ditandai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2019 yakni:

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebanyak 9500 sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP sebesar 100%
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebanyak 850 sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 4 layanan
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebanyak 2 pelabuhan/bandara
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan sebanyak 9000 sertifikat
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebanyak 5 pelabuhan/bandara
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 5 pelabuhan/bandara
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 500 orang
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 40 dokumen
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 8 pelatihan
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 28 unit.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sedangkan indikator kinerja sasaran tahun 2015-2019 sebelum indikator diseragamkan (tabel 5) dan setelah indikator diseragamkan (tabel 6) digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2015 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan penyehatan lingkungan	1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	65	70	75	80	90
	2. Persentase pelabuhan / bandara yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	65	70	75	80	90
	3. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	65	70	75	80	90
	4. Persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah	65	70	75	80	90
	5. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantina	80	85	90	95	100
	6. Persentase pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat sanitasi	80	85	90	95	100
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	7. Persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu	80	85	90	95	100
3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	8. Persentase pelabuhan/bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	65	70	70	75	80
4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	9. Persentase pelabuhan/bandara yang melaksanakan kegiatan <i>screening</i> PTM	65	70	70	75	80
	10. Persentase pelabuhan/bandara yang melaksanakan komitmen kawasan tanpa rokok (KTR)	65	70	70	75	80
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	11. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	80	85	90	95	100

Sasaran dengan indikator yang telah diseragamkan bagi KKP seluruh Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Keseragaman bagi KKP se-Indonesia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	-	-	-	9000 sertifikat	9500 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	-	-	-	90 %	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	-	-	-	800 sertifikat	850 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	-	-	-	4 layanan	4 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara /PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	-	-	-	2 pelabuhan/ bandara	2 pelabuhan/ bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	-	-	-	9000 sertifikat	9000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara /PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	-	-	-	5 pelabuhan/ bandara	5 pelabuhan/ bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara /PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	-	-	-	5 pelabuhan/ bandara	5 pelabuhan/ bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	-	-	-	400 orang	500 orang



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	-	-	-	40 dokumen	40 dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	-	-	-	10 pelatihan	8 pelatihan
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	-	-	-	30 unit	28 unit

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KKP Kelas III Jambi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	Sertifikat PHQC dan SSCEC	9500 sertifikat	87.072.000
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	Sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon <24 jam	100 %	85.700.000
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	Sertifikat COP, Gendec, dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya	850 sertifikat	78.728.000
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Jumlah posko pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru	4 layanan	267.500.000
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	Dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	2 pelabuhan/bandara	68.870.000
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	Sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izinangkut jenazah, legalisasi ICV	9000 sertifikat	74.037.000
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	Tempat Pengolahan Makanan dan Tempat Penyediaan Air Bersih yang memenuhi syarat	5 pelabuhan/bandara	46.650.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	Indeks pinjal $\leq 1$ , HI perimeter = 0 HI buffer < 1, larva anopheles = 0, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 6	5 pelabuhan/bandara	179.343.000
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	Orang yang melaksanakan skrining penyakit menular (TB, HIV/AIDS)	500 orang	157.480.000
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Dokumen RKAKL, Laptah, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBK, dokumen kepegawaian, e-Monev DJA, e-monev Bappenas, LEB	40 dokumen	10.064.854.000
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	Jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM	8 pelatihan	157.277.000
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	Jumlah pengadaan alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan	28 unit	251.260.000

## B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Isi perjanjian kinerja berupa RKT tahun anggaran 2019 serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan jumlah nominal anggaran sebesar Rp 12.452.314.000,-. Dokumen perjanjian kinerja (penetapan kinerja) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	9500 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	850 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	4 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	2 pelabuhan/bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	9000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 pelabuhan/bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 pelabuhan/bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	500 orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	8 pelatihan
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	28 unit

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Output RKAKL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

NO	OUTPUT RKAKL	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	17 Layanan	Rp. 168.318.000
	a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di KKP	1 Layanan	Rp. 135.758.000
	b. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	16 Layanan	Rp. 32.560.000
2	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	402 Layanan	Rp. 1.334.139.000
	a. Layanan Pelaksanaan Kekejarantinaan Kesehatan di KKP	6 Layanan	Rp. 1.205.967.000
	b. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	144 Layanan	Rp. 69.120.000
	c. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP ( <i>Certificate of Pratique</i> )	24 Layanan	Rp. 13.200.000
	d. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC ( <i>Public Health Quarantine Clearance</i> )	48 Layanan	Rp. 17.952.000
	e. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	180 Layanan	Rp. 27.900.000
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2 Layanan	Rp. 115.000.000
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	405 Layanan	Rp. 442.900.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	1 Layanan	Rp. 257.422.000
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000
	c. Layanan Survei Vektor Pes	24 Layanan	Rp. 49.728.000
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000
	e. Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000
	f. Layanan Survei Vektor DBD	250 Layanan	Rp. 41.250.000
	g. Layanan Survei Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 9.450.000
	h. Layanan Survei Vektor Malaria	15 Layanan	Rp. 23.355.000
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	4 Layanan	Rp. 82.480.000
	a. Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 74.305.000
	b. Layanan Tes HIV dan IMS di KKP	3 Layanan	Rp. 8.175.000
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	11 Layanan	Rp. 75.000.000
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	2 Layanan	Rp. 31.300.000
	b. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	9 Layanan	Rp. 43.700.000
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 251.260.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 846.730.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 9.136.487.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 12.452.314.000</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam kurun waktu Januari – Desember tahun 2019.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dibandingkan dengan tahun 2018. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Dalam rangka mencapai sasaran strategis, perlu ditinjau indikator-indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dilakukan dengan asumsi bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi secara keseluruhan, dihitung berdasarkan jumlah indikator yang tercapai dibagi dengan target tahun berjalan.

Di bawah ini akan disampaikan hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kegiatan :

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB</b>	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	9500 sertifikat	13546 sertifikat	142,59
	2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%	100
	3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	850 sertifikat	1257 laporan/sertifikat	147,88
	4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	4 layanan	5 layanan	125
	5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	2 pelabuhan/bandara	2 pelabuhan/bandara	100
	6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	9000 sertifikat	12555 sertifikat	139,5
	7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 pelabuhan/bandara	5 pelabuhan/bandara	100
<b>Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik</b>	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 pelabuhan/bandara	5 pelabuhan/bandara	100
<b>Menurunnya penyakit menular langsung</b>	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	500 orang	590 orang	118
<b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen	40 dokumen	100
	11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	8 pelatihan	8 pelatihan	100
	12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	28 unit	32 unit	114,28
<b>Total Rata-rata % Capaian Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2019</b>				<b>115,60</b>

## A. Capaian Kinerja

### 1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

#### a. Pengertian

Kegiatan pemeriksaan kapal di pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan kekarantinaan kesehatan yang berlaku

#### b. Definisi operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode tahun 2019 yang dicapai melalui akumulasi jumlah sertifikat PHQC, SSCEC/SSCC pada tahun 2019

#### c. Rumus/Cara Perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2019. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015 - 2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta rencana kinerja tahun berjalan. Berikut detail perhitungan realisasi indikator :

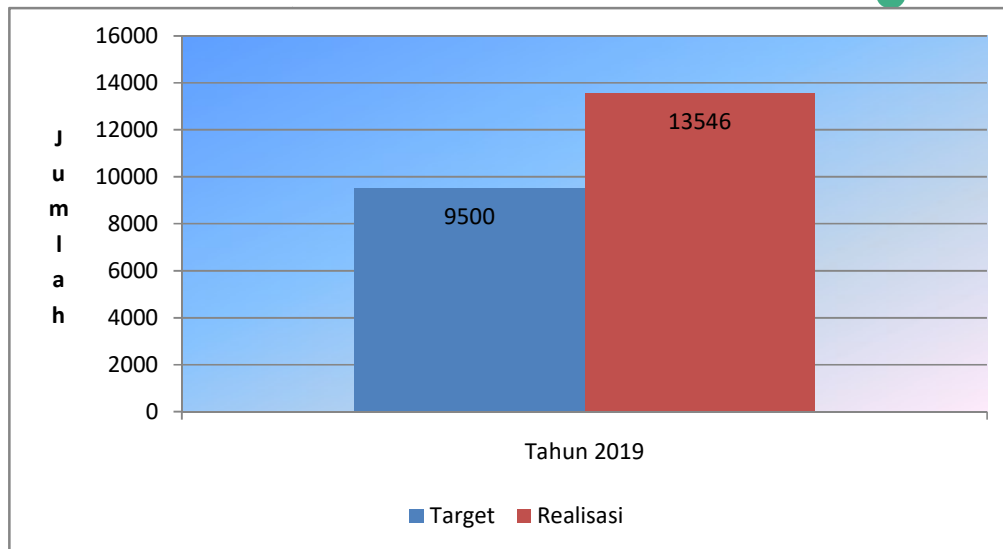
$$\text{Jumlah Dokumen Kapal} = \text{PHQC} + \text{SSCEC/SSCC}$$

#### d. Capaian indikator

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional, terdapat dua komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, dimana dua komponen tersebut adalah :

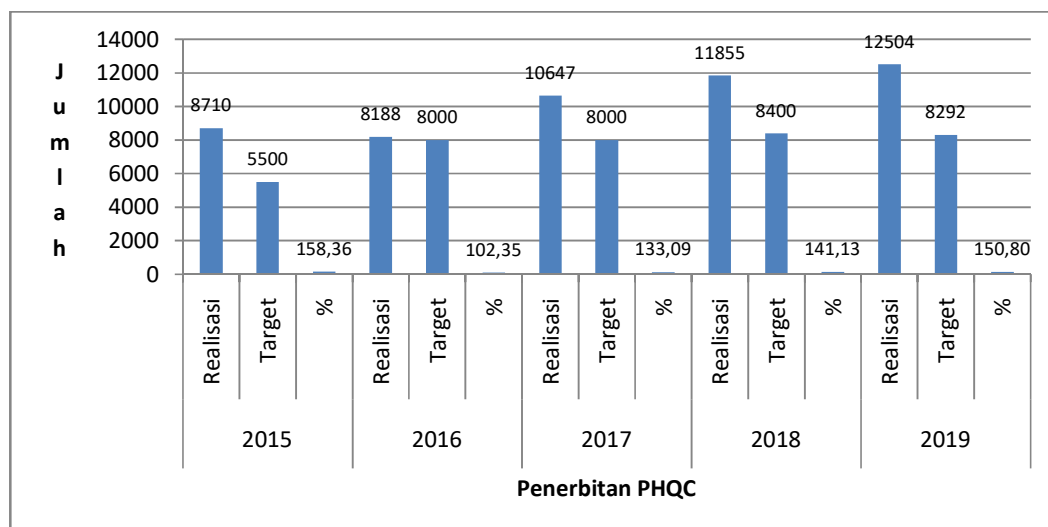
Tabel 11. Capaian Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2019

No	Breakdown Indikator	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	PHQC	8.292	12.504
2	SSCC/SSCEC	1.208	1035
<b>Total</b>		<b>9.500</b>	<b>13.546</b>
% Capaian		<b>142,59 %</b>	



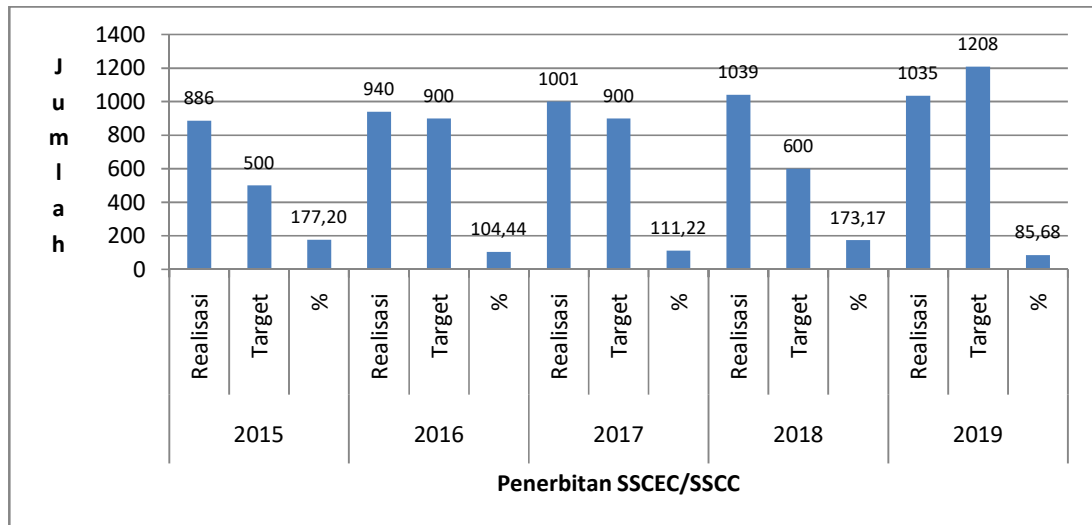
Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaankesehatan Tahun 2019

Progress capaian indikator setiap bulan dapat dilihat pada lampiran. Walaupun terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan, akan tetapi breakdown capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diketahui progress capaian indikator dari tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 6. Tren Penerbitan dokumen PHQC dari tahun 2015-2019



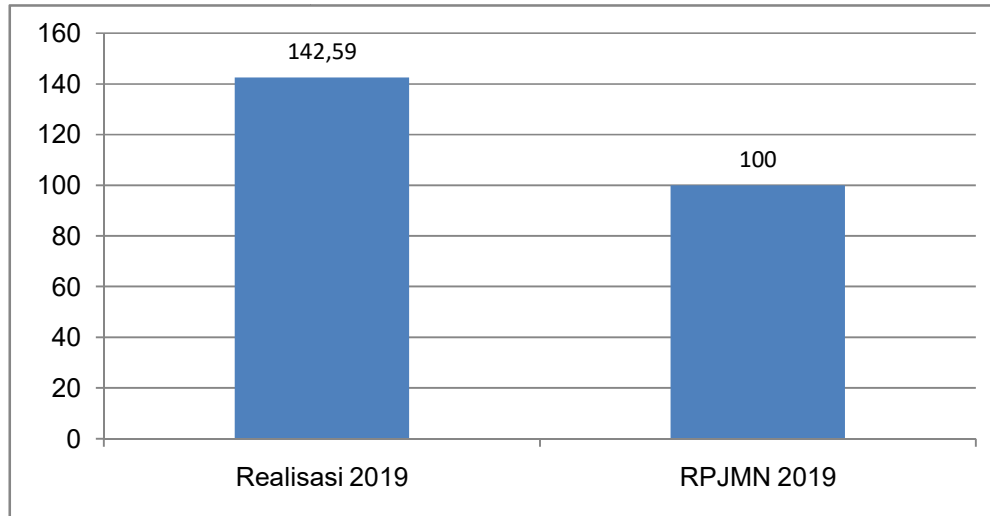


Grafik 7. Tren Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

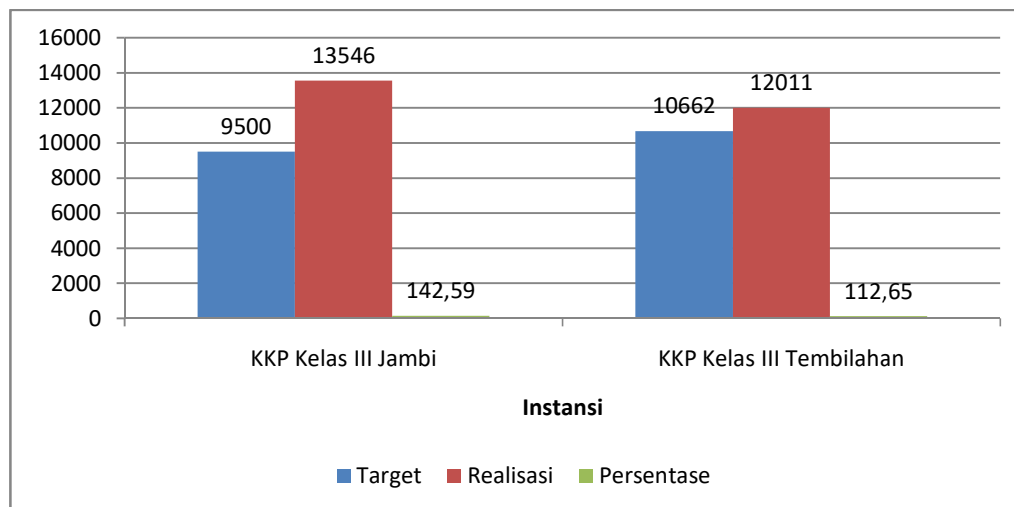
Berdasarkan grafik diatas, dengan melihat tren penerbitan dokumen kesehatan baik PHQC maupun SSCEC/SSCC diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan selalu naik setiap tahunnya yang dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun untuk penerbitan SSCEC/SSCC tahun 2019 capaian menurun walaupun sebenarnya sudah mencapai dari target yang telah di tetapkan. Menurun maupun meningkatnya jumlah dokumen/sertifikat yang diterbitkan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti jumlah kedatangan kapal yang tidak bisa dikendalikan oleh KKP Kelas III Jambi.

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 dengan bunyi indikator yang sama yaitu Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian KKP Keas III Jambi tahun 2019 sebesar 142,59% maka sudah melebihi target dari RPJMN tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2018 lebih besar yaitu adalah 142,59% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (106,27%) (grafik9).



Grafik 8. Perbandingan realisasi indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan Tahun 2018 dengan RPJMN 2018



Grafik 9. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator kinerja pertama ini adalah sebesar Rp. 87.072.000 dan terealisasi sebesar Rp. 86.982.000 (99,9%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, hygiene dan sanitasi kapal serta dilakukan surveilans epidemiologi pada faktor risiko alat angkut yang masuk dan keluar dari wilayah pelabuhan Jambi sesuai dengan SOP KKP Kelas III Jambi.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

g. Masalah yang dihadapi

Petugas penerbitan dokumen PHQC di wilayah kerja masih sering menggunakan dokumen *generate*, sehingga menyebabkan sering terjadinya keterambatan publish dokumen. Dokumen hanya akan dianggap legal setelah di publish, artinya apabila kapal sampai tujuan dan dilakukan pemeriksaan dokumen maka dokumen tersebut dianggap tidak sah. Selain itu masih banyak pemohon layanan (agen kapal/Perusahaan pelayaran) yang belum melakukan permohonan layanan penerbitan dokumen kesehatan secara online, hal itu berdampak memperlambat proses pelayanan dan kurang lengkapnya data permohonan.

h. Upaya Pemecahan Masalah

Pembuatan kebijakan penerbitan dokumen harus segera disertai *publish* dokumen. Dilakukan sosialisasi bahwa *generate* dokumen hanya diperuntukkan ketika terjadi permasalahan jaringan, kerusakan alat dukung pembuatan dan pencetakan dokumen. Dilakukan sosialisasi dan *review* penggunaan layanan kapal oleh pengguna jasa (perusahaan pelayaran dan agen kapal).

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator pertama ini adalah Rp.87.072.000 dan terealisasi sebesar Rp. 86.982.000 (99,9%). Capaian indikator pertama pada tahun 2019 adalah sebesar 13.546 sertifikat dari target yang ditetapkan sebesar 9.500 sertifikat (142,59%) artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 42,69%.

## 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

a. Pengertian

Terlaksananya kegiatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap faktor risiko penyakit potensial wabah/PHEIC di pintu masuk negara dan wilayah *perimeter/buffer* KKP pada sistem surveilans epidemiologi berbasis indikator dan

surveilans epidemiologi berbasis kejadian, dimana setiap kejadian yang menjadi peringatan diberikan respon tindaklanjut penanggulangannya berupa arahan tindaklanjut/penyelidikan epidemiologi/verifikasi rumor, serta adanya koordinasi yang melibatkan *stake holder* lintas sektor (dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan puskesmas terkait) dalam upaya pengawasan dan penanggulangan penyakit potensial wabah.

b. Definisi operasional

Jumlahsinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun, yang diperoleh dengan cara menghitung sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%.

c. Rumus/Cara Perhitungan

$$\% \text{ Respon SKD KLB} = \frac{\sum \text{Sinyal SKD KLB direspon} < 24 \text{ jam}}{\sum \text{Laporan Sinyal SKD KLB diterima}} \times 100\%$$

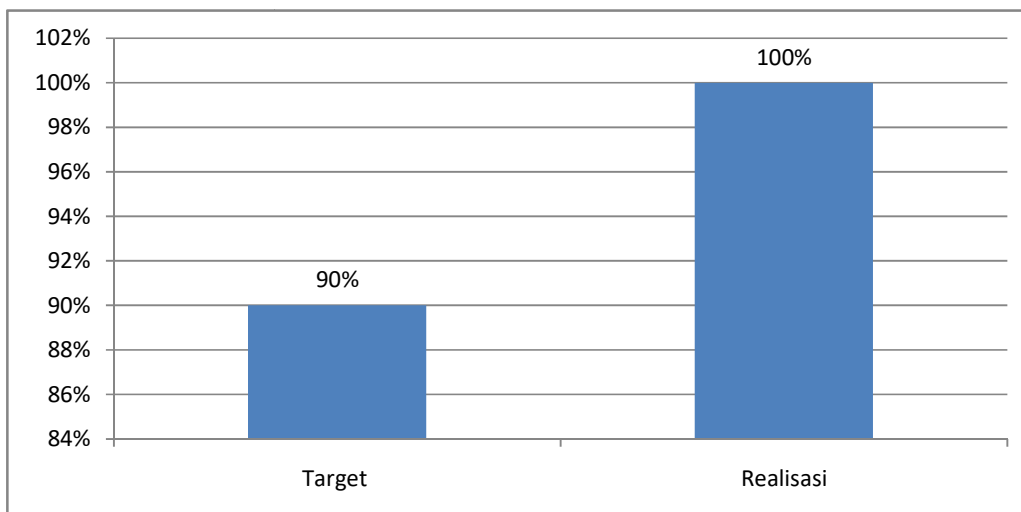
d. Capaian indikator

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional, bahwa untuk mencapai indikator kedua diperoleh dengan cara merespon setiap sinyal SKD KLB kurang dari 24 jam. Capaian indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Kelas III Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Capaian Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019

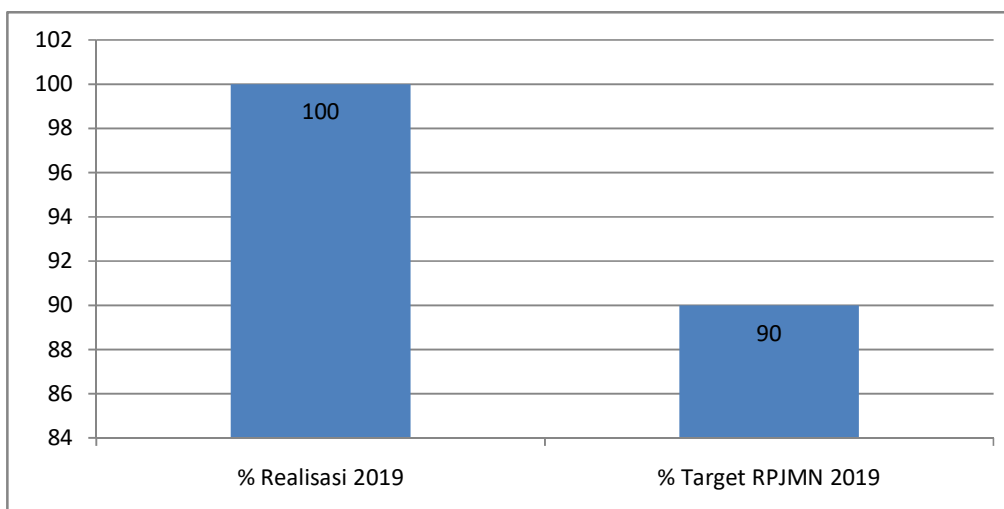
No	Breakdown Indikator	Target	Realisasi
1	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam		170
2	Jumlah laporan sinyal yang diterima		170
Total %		100 %	100%
% Capaian		<b>100%</b>	

Capaian indikator persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Kelas III Jambi pada tahun 2019 capaian indikator adalah sebesar 100% (grafik10).

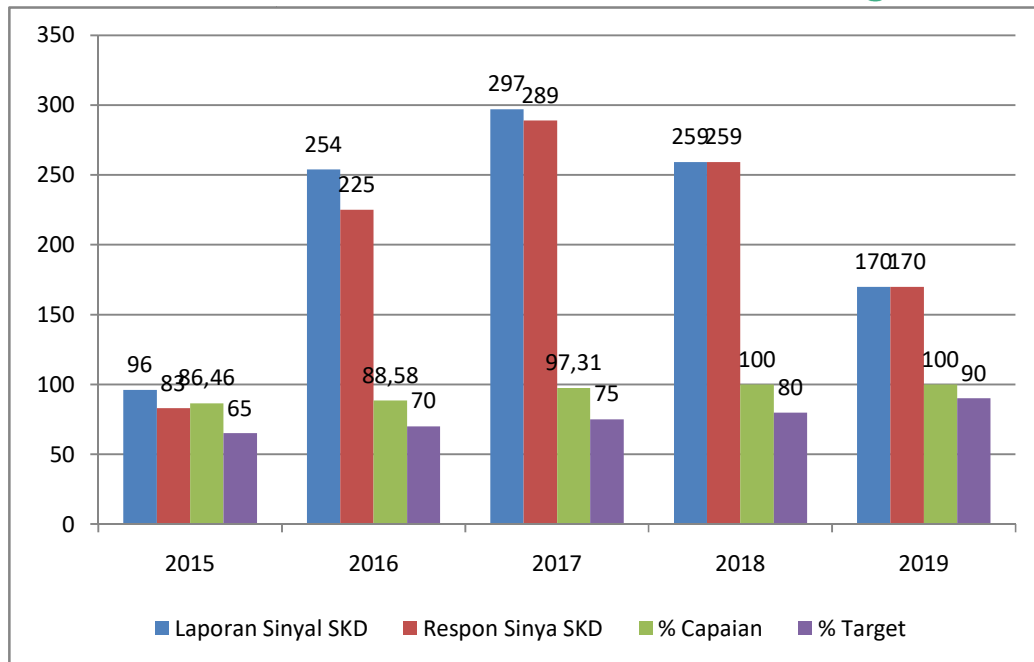


Grafik 10. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2019 capaian KKP Kelas III Jambi sudah diatas target RPJMN tahun 2019 yaitu Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di wilayah layanan BTKL sebesar 90% sedangkan capaian KKP kelas III jambi adalah sebesar 100% (grafik11), artinya selruh sinyal SKD yang diterima seluruhnya sudah dilakukan respon baik dalam bentuk konfirmasi kebenaran kasus melalui koordinasi dengan puskesmas, penyelidikan epidemiologi dan verifikasi rumor.



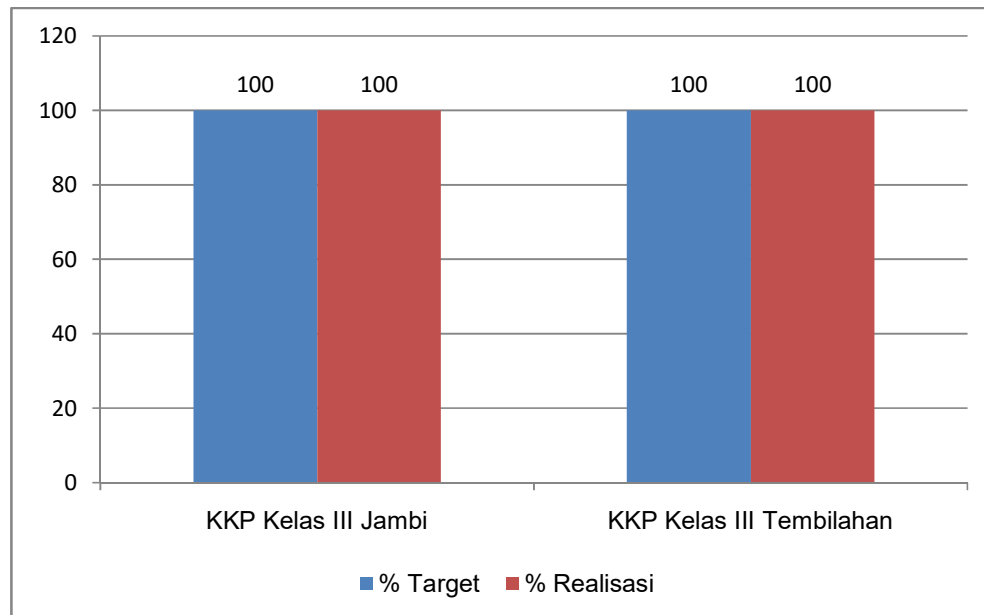
Grafik 11. Perbandingan realisasi indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019



Grafik 12. Tren Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Kelas III Jambi Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui tren respon terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD)/KLB pada tahun 2019 cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun namun di tahun 2018 dan 2019 capaian sama besar yaitu 100%. Hal ini dikarenakan jejaring surveilans dengan lintas sektor sehingga memudahkan dalam koordinasi terhadap respon sinyal SKD.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 sama besar yaitu adalah 100% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (100%) (grafik 13).



Grafik 13. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP Kelas III Jambi Tahun 2019. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 85.700.000,- dan serapan sebesar Rp. 85.700.000 (100%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti (Pertemuan Jejaring Kemitraan dengan Stakeholder dan Sosialisasi PPML). Di samping itu dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang melalui *coffee morning*.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

- g. Masalah yang dihadapi
- 1) Belum seluruh penyakit potensial wabah mendapat perhatian petugas, misalnya ditemukan permasalahan masih terlarut pada penyakit diare dan ISPA.
  - 2) Dedikasi dan keterampilan petugas rendah
    - a) Masih ditemukan kesalahan dalam penetapan kasus/tersangka (sarana pelayanan kesehatan tidak menempel/mempedomani DO kasus/tersangka).
    - b) Kasus sering hilang jika dikonfirmasi
    - c) Tidak ada analisis data di sarana pelayanan kesehatan
  - 3) Tidak semua peringatan dapat dilakukan penyelidikan epidemiologi dikarenakan keterbatasan anggaran dan tenaga
  - 4) Informasi adanya rumor kasus yang diperoleh sering terlambat sehingga upaya penganggulangan dini sulit dilakukan
- h. Upaya Pemecahan Masalah
- 1) Peningkatan kualitas data yang dilaporkan dengan bimbingan teknis baik pada kegiatan monev maupun pada saat supervisi untuk mengetahui permasalahan secara spesifik dan memberi solusi pemecahannya
  - 2) Memberi *update* pengetahuan petugas surveilans puskesmas yang memerlukan tentang pelaksanaan SKDR dan penggunaan *software* pengolahan data
  - 3) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan respon yang dilakukan terhadap peringatan yang muncul.
  - 4) Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti (Pertemuan Jejaring Kemitraan dengan *Stakeholder* dan Sosialisasi PPML). Di samping itu dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang melalui *coffe morning*.
  - 5) Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi (pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data) melalui pertemuan.



i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada indikator kinerja Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP adalah Alokasi anggaran yang telah di sediakan senilai Rp. Rp. 85.700.000,- dan serapan sebesar Rp. 85.700.000. Realisasi anggaran sebesar 100%, sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 100% (dari 170 laporan sinyal SKD yang diterima 170 respon yang diberikan pada sinyal SKD/KLB). Artinya ada efisiensi sumber daya.

**3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit**

a. Pengertian

Kegiatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di pelabuhan di pelabuhan udara/laut terhadap masuk dan keluarnya penyakit melalui kegiatan pengawasan alat angkut dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

b. Definisi Operasional

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah :

- a) Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal melalui penerbitan dokumen *Certificate Of Pratique* (COP)
- b) Surveilans Rutin yang terdiri dari :
  - (1) Surveilans Epidemiologi Faktor risiko penyakit berpotensi KLB bencana
  - (2) Surveilans Epidemiologi Haji
  - (3) Surveilans Epidemiologi pada pelaku perjalanan internasional

c. Rumus/ Cara Perhitungan

$$\text{Jumlah Deteksi dini} = \sum \text{Sertifikat COP} + \sum \text{Lap Surveilans Rutin}$$

d. Capaian Indikator

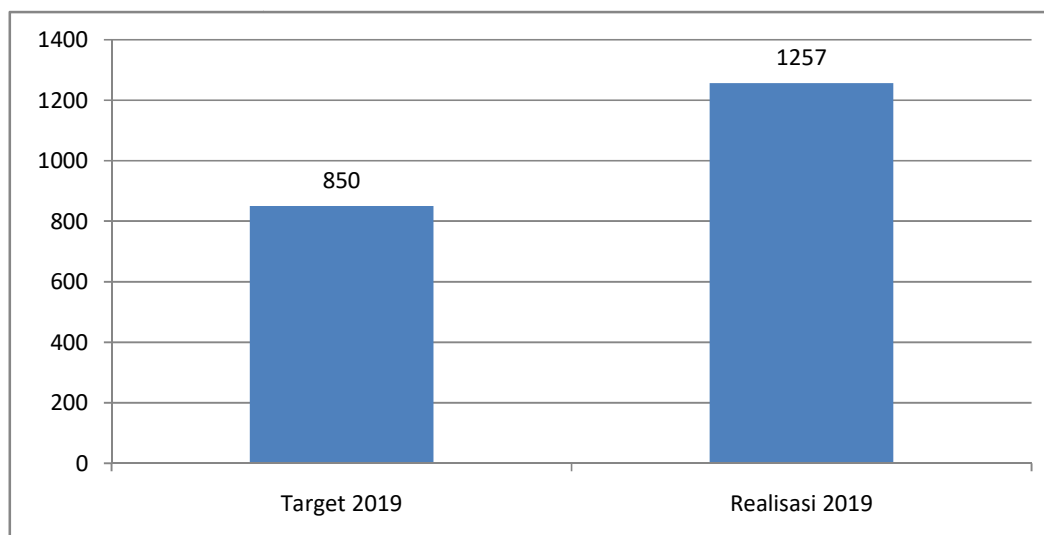
Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional bahwa terdapat dua komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit melalui Pengawasan

kedatangan dan keberangkatan kapal melalui penerbitan dokumen *Certificate Of Pratique* (COP) dan Surveilans Rutin.

Tabel 13. Capaian Indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019

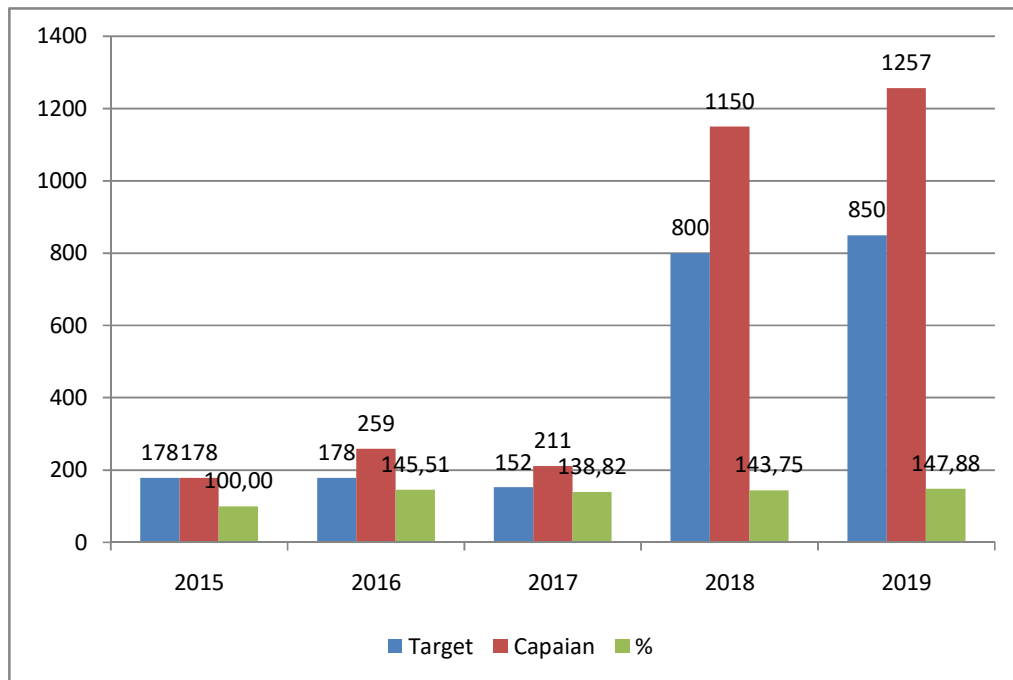
No	Breakdown Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal melalui penerbitan dokumen <i>Certificate Of Pratique</i> (COP)	791	1.197	
2	Surveilans Rutin	59	60	
Total %		850	1.257	147,88

Capaian indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019 adalah sebesar 147,88 % (grafik 14).



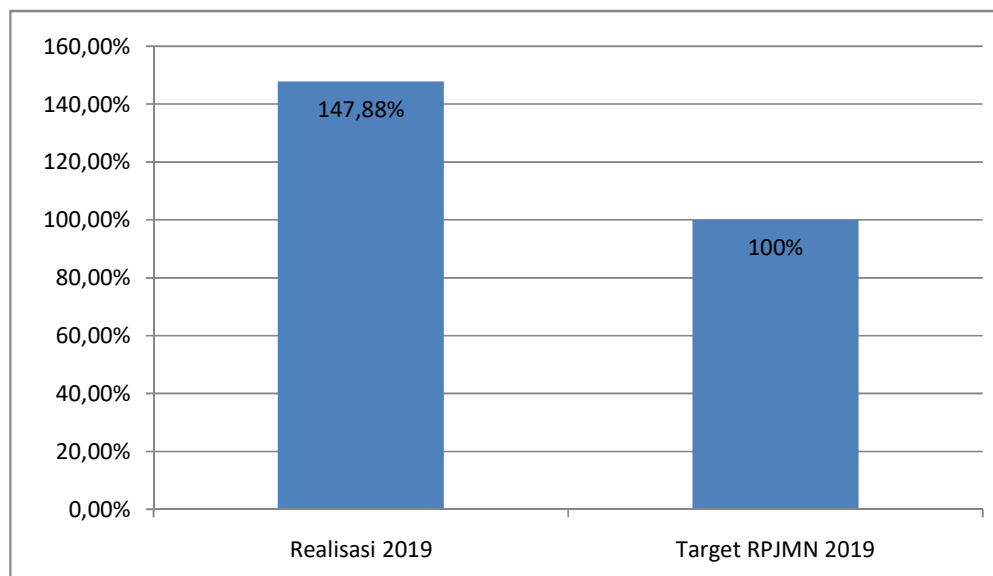
Grafik 14. Capaian indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Tahun 2019

Tren Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2015-2019 cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dikarenakan jejaring surveilans dengan lintas sektor sehingga memudahkan dalam koordinasi terhadap respon sinyal SKD (grafik 15).



Grafik 15. Tren Indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2015-2019

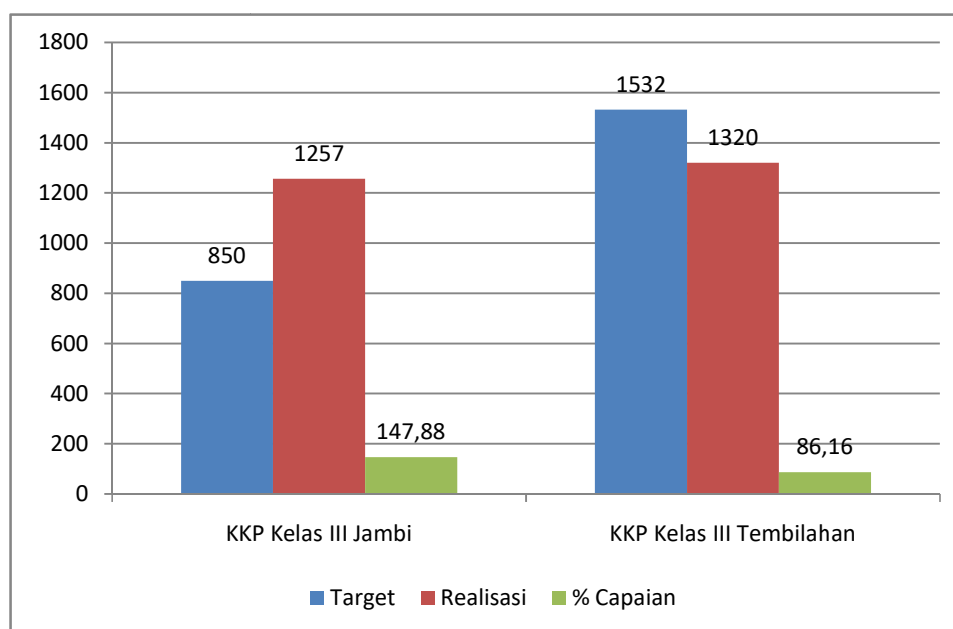
Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 147,88% sudah melebihi target dari RPJMN tahun 2019 sebesar 100%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut



Grafik 16. Perbandingan realisasi indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2019 (147,88%) sudah melebihi target RPJMN tahun 2019 yaitu Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan wilayah pada tahun 2019 sebesar 100% , hal ini dikarenakan jejaring surveilans dengan lintas sektor sehingga memudahkan dalam koordinasi terhadap deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2019 KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 lebih besar yaitu adalah 147,88% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (86,16%) (grafik 17)



Grafik 147. Perbandingan Realisasi indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Indikator deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP Kelas III Jambi Tahun 2019. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 78.728.000,- dan serapan sebesar Rp. 78.728.000 (100%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Menjalin kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang. Memperkuat koordinasi antara petugas dengan KBIH dalam hal pengawasan pelaku perjalanan internasional, lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti (Pertemuan Jejaring Kemitraan dengan *Stakeholder* dan Sosialisasi PPML).

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan kesehatan telah sesuai dengan analisis beban kinerja dan juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan *stakeholder* di lingkungan KKP Kelas III Jambi serta didukung juga oleh pengadaan bahan kesehatan sebagai penunjang kegiatan pelayanan.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Belum maksimalnya pengawasan pelaku perjalanan internasional oleh dinas kesehatan kabupaten/kota 14 hari setelah kepulangannya
- 2) Masih ada jamaah haji dengan riwayat penyakit tertentu tidak dilakukan istitaah pada tahap pemeriksaan tahap pertama dan kedua.
- 3) Masih terdapat banyak kesalahan dalam pengisian data ICV pada KKJH melalui siskohatkes oleh petugas kabupaten/kota
- 4) Masih terdapat jamaah haji yang tidak memiliki K3JH
- 5) Kurangnya kepedulian jamaah umroh untuk mengembalikan HAC ke puskesmas sebagai alat pemantauan kondisi jamaah setelah kembali ke tanah air.
- 6) HAC terawasi masih sedikit dikarenakan tidak semua jamaah kembali melalui Bandara Sultan Thaha Jambi, tidak semua jamaah umroh diperiksa dikarenakan jamaah tidak menggunakan seragam jamaah sehingga memungkinkan bercampur dengan penumpang pesawat lainnya dan tidak semua HAC diperiksa di bandara domestik karena bila sudah diperiksa di bandara internasional di bandara domestik tidak diperiksa kembali.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui pertemuan dan pelatihan.
- 2) Pemberitahuan secara tertulis kepada travel umroh syarat dan kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat ICV.
- 3) Memberikan catatan kecil pada kartu HAC dan meminta travel umroh untuk mengumpulkan kartu HAC kepada petugas di Bandara

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada indikator kinerja deteksi dini adalah Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 78.728.000,- dan serapan sebesar Rp. 78.728.000. Realisasi anggaran sebesar 100%, sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 147,88%. Artinya ada efisiensi sumber daya sebesar 48,88%.

#### 4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

a. Pengertian

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus merupakan indikator yang menunjukkan terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus melalui kegiatan posko pelayanan kesehatan pada saat arus mudik lebaran, natal dan tahun baru serta posko pelayanan kesehatan pada jamaah haji pada saat embarkasi haji antara.

b. Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu (lebaran, natal dan tahun baru, haji dan lain-lain). Kegiatan yang dilakukan dituangkan dalam bentuk layanan, diantaranya :

- Layanan posko kesehatan arus mudik dan balik lebaran/hari raya idul fitri
- Layanan posko kesehatan arus mudik dan balik natal dan tahun baru
- Layanan posko kesehatan kegiatan embarkasi dan debarkasi haji antara

c. Rumus/Cara Perhitungan

Indikator 4 = jumlah posko pelayanan kesehatan lebaran + jumlah posko pelayanan kesehatan nataru + jumlah pelayanan posko kesehatan Embarkasi haji antara

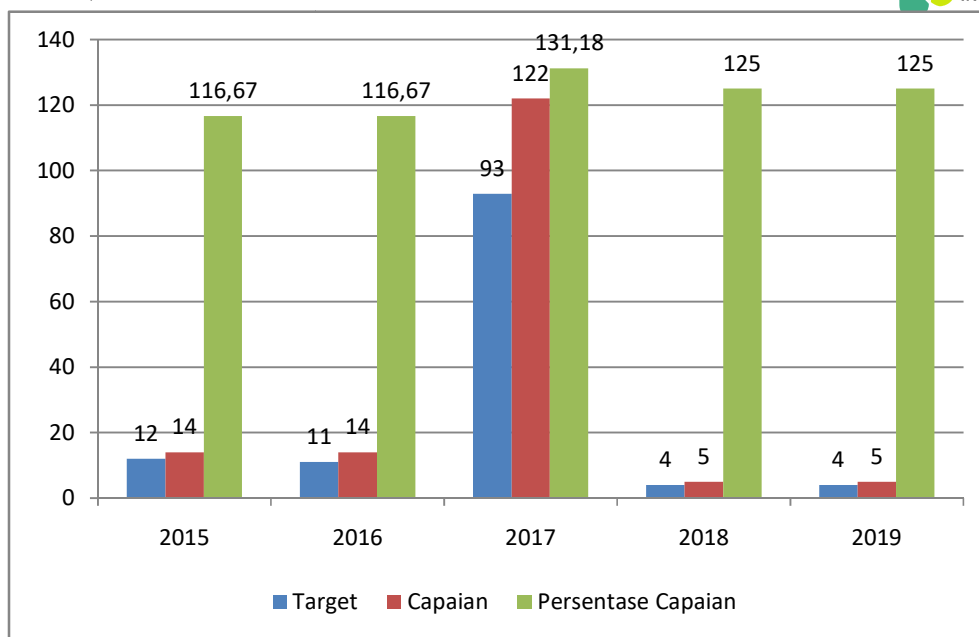
d. Capaian indikator

Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dicapai melalui kegiatan pelayanan posko kesehatan pada saat arus dan mudik lebaran (2 layanan), natal dan tahun baru (2 layanan), serta pelayanan posko kesehatan pada saat embarkasi haji antara (1 layanan). Berikut besaran target dan realisasi masing-masing kegiatan yang terdapat dalam indikator Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus Tahun 2019 :

Tabel 14. Target, realisasi dan jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2019

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan	4	5	125
	1. Pelayanan posko kesehatan pada saat arus mudik dan balik lebaran /hari raya idul fitri	2	2	
	2. Pelayanan posko kesehatan pada saat arus mudik dan balik natal dan tahun baru	2	2	
	3. Pelayanan posko kesehatan pada saat embarkasi haji antara (EHA dan DHA)	-	1	

Trend pencapaian indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 158. Trend Perbandingan jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 2015 s.d. 2019

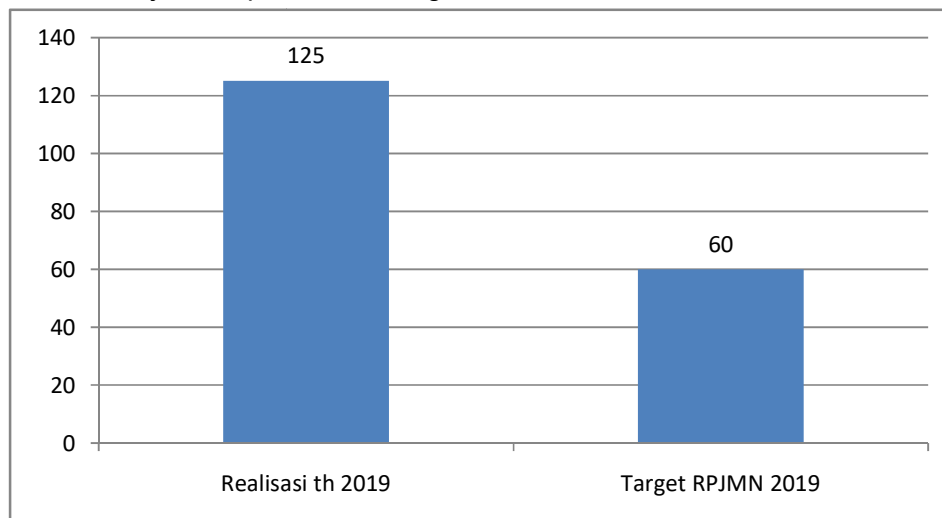
Berdasarkan grafik di atas trend perbandingan indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan penurunan tetapi tetap berada di angka diatas 100%. Capaian indikator dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 persentase tetap berada di 116,67%. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan kenaikan pada range 14,5% (2016 - 2017); sedangkan pada tahun 2019 persentase mengalami penurunan tetapi tetap mencapai target yaitu 100% (2018-2019); hal tersebut dikarenakan penetapan target yang ditingkatkan melebihi 100 % yaitu dengan peningkatan target sebanyak 4 layanan; rata-rata pencapaian target sebesar 124,80% (2013-2018) hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah target pencapaian, persentase pada capaian 100%. Capaian indikator pada tahun 2018 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan selama lima tahun (2015 - 2019) konsisten dengan pencapaian target melebihi 100%. Hal ini dikarenakan adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus dan perubahan status embarkasi haji jambi yang sebelumnya masih dilakukan di embarkasi Batam dan Padang menjadi embarkasi haji antara provinsi Jambi, dimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tahap akhir yaitu pemeriksaan kesehatan yang ketiga dilaksanakan di KKP Jambi.

Selain dengan memperbandingkan dengan 4 tahun terakhir, kita juga bisa memperbandingkan dengan target RPJMN tahun 2019. Dimana capaian KKP



Kelas III Jambi (125%) sudah melebihi dari target RPJMN tahun 2019 (51%).

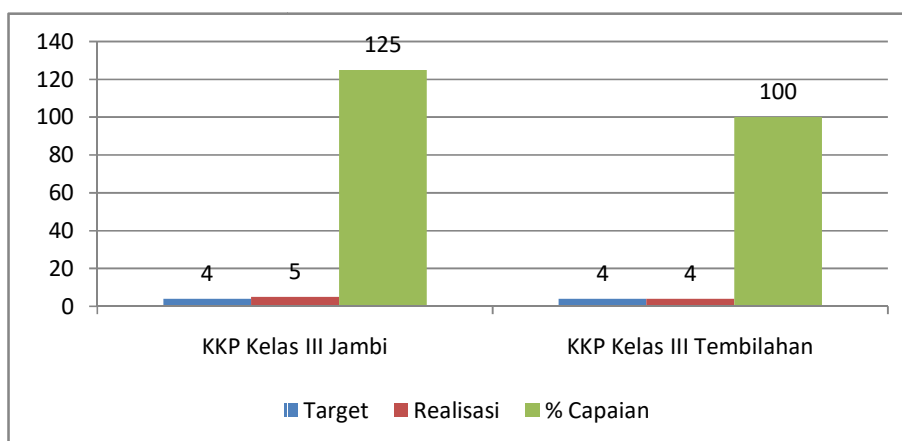
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 19. Perbandingan realisasi indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus Tahun 2019 dengan RPJMN 2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator ini jauh melampaui target dari RPJMN 2014-2019. Akan tetapi realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dikarenakan tidak adanya standar nasional yang ditetapkan untuk indikator kinerja “jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus”.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan. Dimana pada indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus Tahun 2019 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 lebih besar yaitu adalah 125% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (100%).



Grafik 20. Perbandingan Realisasi jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus merupakan indikator yang mendapat alokasi dana dari anggaran KKP Kelas III Jambi tahun anggaran 2019. Alokasi anggaran yang disediakan senilai Rp. 267.500.000 dan serapan sebesar Rp. 267.500.000,- (100%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Pelayanan kesehatan pada saat arus mudik lebaran, natal dan tahun baru dipusatkan di Wilker Bandara Sultan Thaha Jambi dan Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Tungkal. Sedangkan posko pelayanan kesehatan pada saat embarkasi haji antara dilaksanakan pada saat embarkasi dan debarkasi yang bertempat di asrama haji jambi.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan kesehatan telah sesuai dengan analisis beban kinerja dan juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan stakeholder di lingkungan KKP Kelas III Jambi.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Sebagian besar penumpang kapal/pesawat ada yang tidak mengetahui keberadaan posko pelayanan kesehatan pada saat arus mudik baik itu di bandara ataupun di pelabuhan
- 2) Obat-obatan yang disediakan oleh puskes haji tidak mencakup semua kebutuhan obat di lapangan

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Pentingnya koordinasi dengan *General Manager* PT. Angkasa Pura dan KSOP Pelabuhan untuk pemasangan spanduk dan *banner* dalam rangka upaya promotif dan preventif dalam hal pelayanan kesehatan pada saat posko lebaran maupun nataru
- 2) Disubsidi dengan obat-obatan yang ada di klinik KKP.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp.267.500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 267.500,000. Anggaran yang terealisasi sebesar 100% dan capaian fisik dari indikator ini adalah 125% (target 4

layanan dan terealisasi 5 layanan), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25 %.

**5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah**

a. Pengertian

Kegiatan pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah baik di bandara maupun di pelabuhan laut yang ada di KKP Kelas III Jambi.

b. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

c. Rumus/Cara Perhitungan

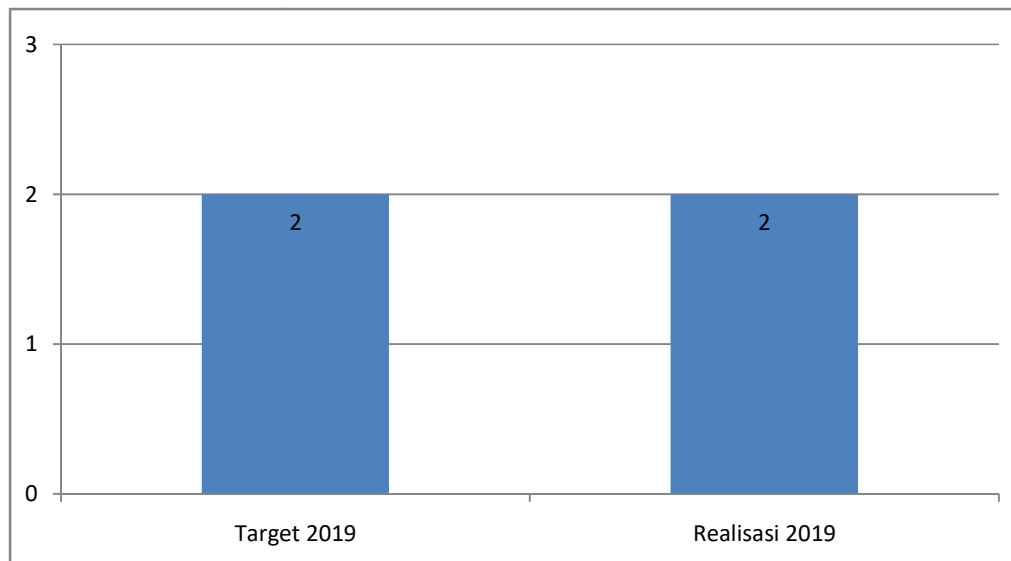
$$\Sigma \text{Pelabuhan} = \text{Table Top renkon bandara} + \text{Review Renkon pelabuhan}$$

d. Capaian indikator

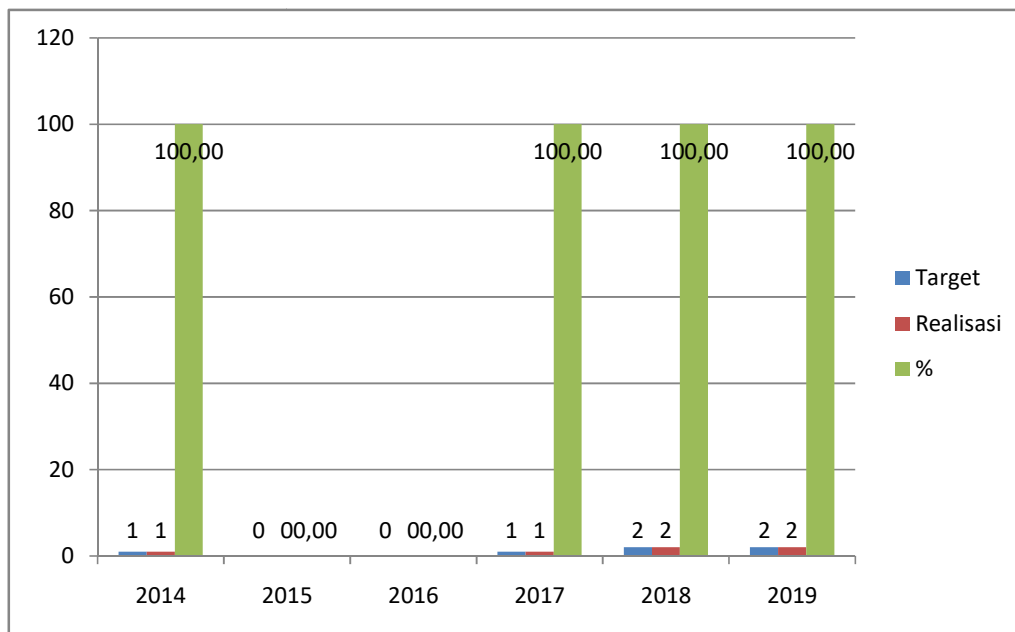
Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional, bahwa terdapat dua komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui kegiatan *Table Top Exercise* renkon bandara dan review renkon Pelabuhan di Kuala Tungkal.

Tabel 15. Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2019

No	Breakdown Indikator	Target	Realisasi	%
1	Table Top Exercise renkon bandara	1	1	100
2	Review renkon Pelabuhan Kuala Tungkal	1	1	100
Total %		2	2	100



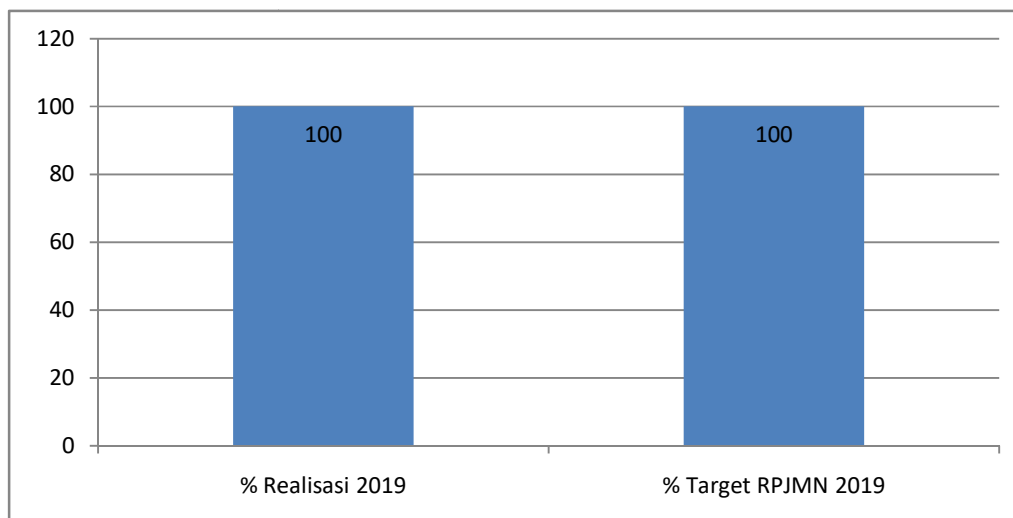
Grafik 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2019



Grafik 16. Tren Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2015-2019

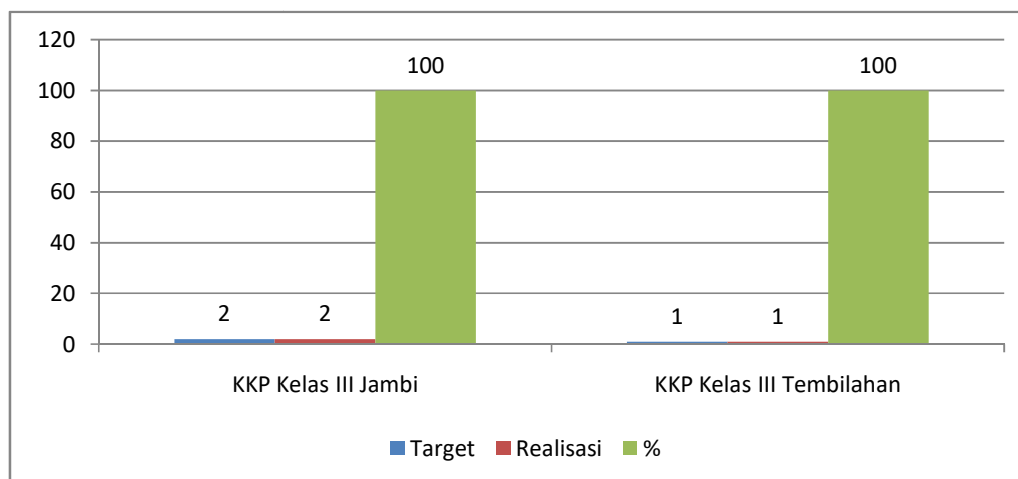
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui tren Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2015-2019 cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada kegiatan penyusunan kebijakan rencana kontijensi baik di pelabuhan maupun bandara wilayah kerja KKP kelas III Jambi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% sudah mencapai target dari RPJMN tahun 2019 yang berbunyi Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.



Grafik 17. Perbandingan realisasi indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2018/9 dengan RPJMN tahun 2019

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun 2019 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 sama besarnya yaitu adalah 100% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (100%).



Grafik 18. Perbandingan realisasi indikator 5 KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP

Kelas III Jambi Tahun 2019. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 68.870.000,- dan serapan sebesar Rp. 68.572.574 (99,57%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti (Pertemuan Jejaring Kemitraan dengan *Stakeholder* dan Sosialisasi PPML). Di samping itu dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang melalui *coffe morning*.

f. Analisis penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Belum seluruhnya wilayah pelabuhan yang merupakan Wilker KKP Jambi memiliki dokumen renkon
- 2) Renkon yang ada masih berupa dokumen dan belum dilakukan simulasi

h. Upaya Pemecahan Masalah

Dilakukan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2019 untuk penambahan pelabuhan yang menyelenggarakan penyusunan renkon serta membuat simulasi terhadap dokumen renkon yang ada.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada indikator kinerja Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah adalah senilai 68.870.000,- dan serapan sebesar Rp. 68.572.574 (99,57%)., sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 100%. Artinya ada efisiensi sumber daya sebesar 0,43%

## 6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

### a. Pengertian

Jumlah sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah yang dikeluarkan di lingkungan pelabuhan/ bandara yang meliputi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun.

### b. Definisi Operasional

Jumlah sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah yang dikeluarkan di wilayah pelabuhan/ bandara yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima. Sertifikat tersebut antara lain :

- 1) Sertifikat laik terbang
- 2) Sertifikat izin angkut orang sakit
- 3) Sertifikat izin angkut jenazah
- 4) Dokumen icv

### c. Rumus/Cara Perhitungan

Indikator 6 = jumlah sertifikat surat izin laik terbang + jumlah sertifikat izin angkut orang sakit + jumlah sertifikat izin angkut jenazah + jumlah penerbitan ICV dalam 1 tahun

### d. Capaian indikator

Capaian indikator Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan adalah 143% yaitu dengan target 9.000 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 12.900 dokumen. *Breakdown* dari indikator tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

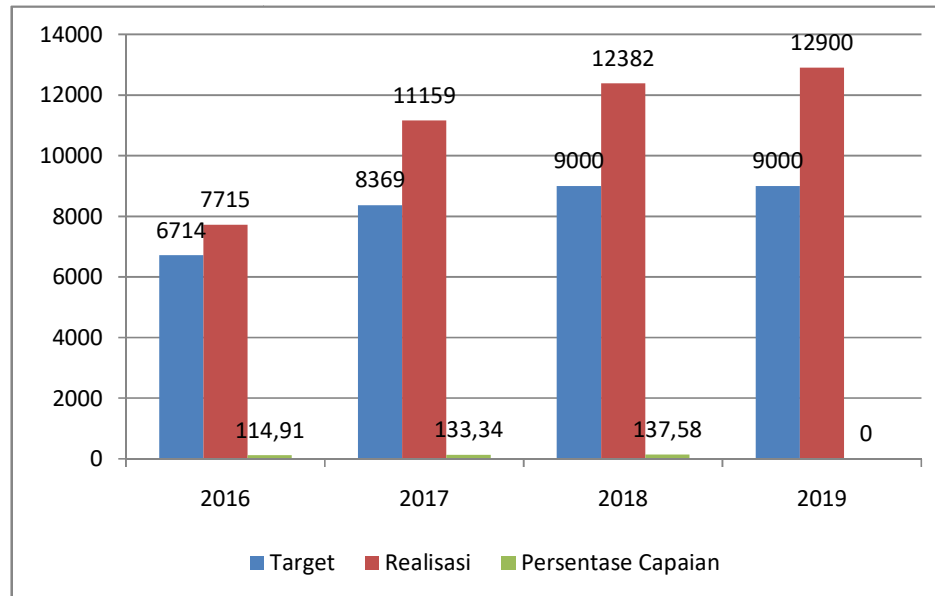


Tabel 16. Capaian Indikator Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

No	Breakdown Indikator	Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase (%)
1	Jumlah sertifikat izin angkut orang sakit	57	52	91,22
2	Jumlah sertifikat laik terbang	708	1.308	184,74
3	Jumlah sertifikat izin angkut jenazah	44	55	125
4	Jumlah penerbitan ICV	8.191	11.485	140,21
TOTAL		9.000	12.900	143,33



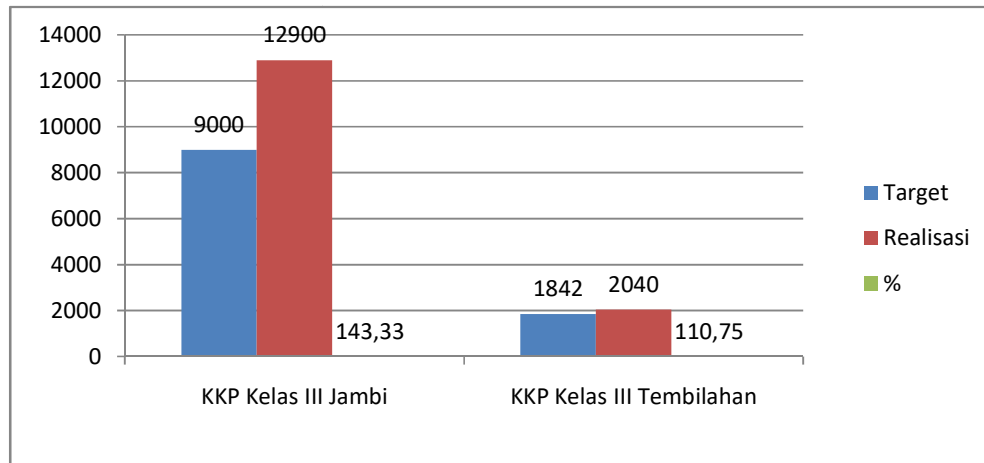
Grafik 19. Perbandingan target dan realisasi indikator Indikator Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan tahun 2019



Grafik 20. Trend Capaian persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah tahun 2016 s.d 2019

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah lima tahun terakhir cenderung stabil dan meningkat dengan persentase diatas 100%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah jamaah umroh Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dan koordinasi yang baik dengan pihak maskapai penerbangan yang telah mewajibkan penumpang untuk memiliki surat laik terbang dan surat izin angkut orang sakit pada penumpang yang terindikasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah Tahun 2019 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 lebih besar yaitu adalah 143,33% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (110,75%).



Grafik 21. Perbandingan Realisasi persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator persentase sertifikat/surat layanan kesehatan lintas wilayah dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan laik terbang penumpang
- 2) Peningkatan pengawasan izin angkut orang sakit di bandara
- 3) Pemberian sertifikat ICV melalui pelayanan kesehatan jemaah umroh dan pelayanan kesehatan terbatas lainnya khususnya pelayanan vaksinasi meningitis
- 4) Peningkatan pengawasan lalu lintas jenazah di bandara

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan kesehatan telah sesuai dengan analisis beban kinerja dan juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan *stakeholder* di lingkungan KKP Kelas III Jambi serta didukung juga oleh pengadaan bahan kesehatan sebagai penunjang kegiatan pelayanan.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Masih ada calon penumpang yang belum mengetahui adanya pemeriksaan laik terbang bagi bayi, ibu hamil, orang sakit dan lansia. Dan pemeriksaan sering dilakukan pada saat pesawat sudah *boarding*.
- 2) Terhambatnya pencetakan dokumen dikarenakan *server* yang terkadang *down*

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh maskapai penerbangan untuk lebih memperhatikan calon penumpang bayi, ibu hamil, lansia dan orang sakit, serta melakukan pemberitahuan sebelum keberangkatan minimal 1 sampai 2 jam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Bandara KKP Jambi.
- 2) Berkordinasi dengan admin pusat untuk pemulihan server

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp.74.037.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.037.000,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 100% dan capaian fisik dari indikator ini adalah 143,33% (target 9.000 dokumen dan terealisasi 12.900 dokumen), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 43,33%.

**7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi**

a. Pengertian

Kawasan pelabuhan/bandara yang telah memenuhi syarat-syarat sanitasi melalui pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan di kawasan pelabuhan/bandara meliputi kegiatan pengendalian risiko lingkungan.

b. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara yang mempunyai Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat layak/hygiene dan tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

c. Rumus/Cara perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2015. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015-2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta rencana kinerja tahun berjalan. Akumulasi pelabuhan/bandarayang mempunyai Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dalam satu tahun. Berikut *detail* perhitungan realisasi indikator :

$$\Sigma \text{Pelabuhan/bandara} = \Sigma \text{Pelabuhan/bandara (TPM MS + TPAB MS)}$$

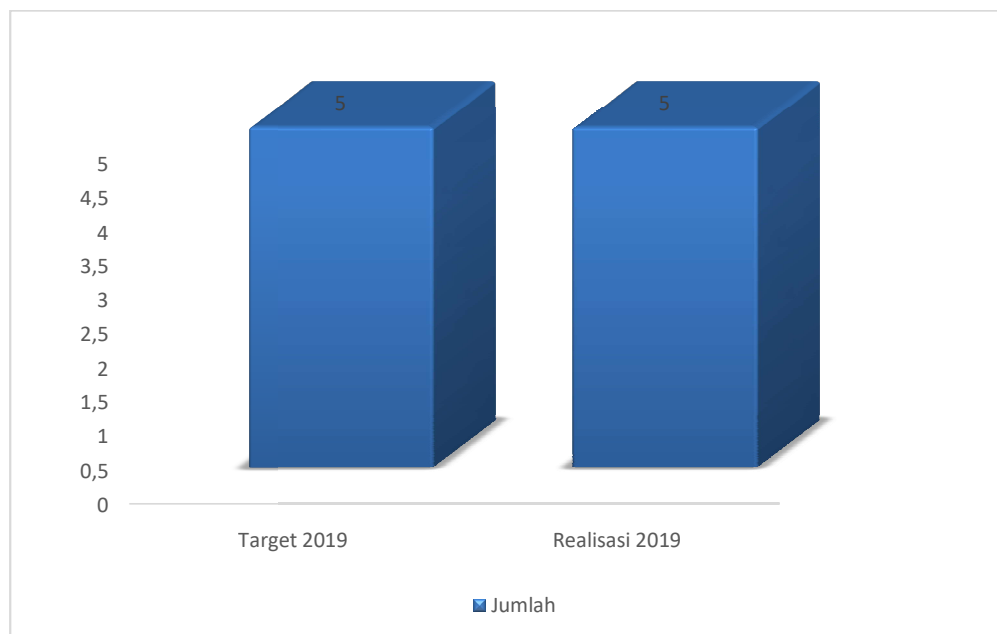
d. Capaian Indikator

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional bahwa terdapat dua komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat layak/hygiene dan tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

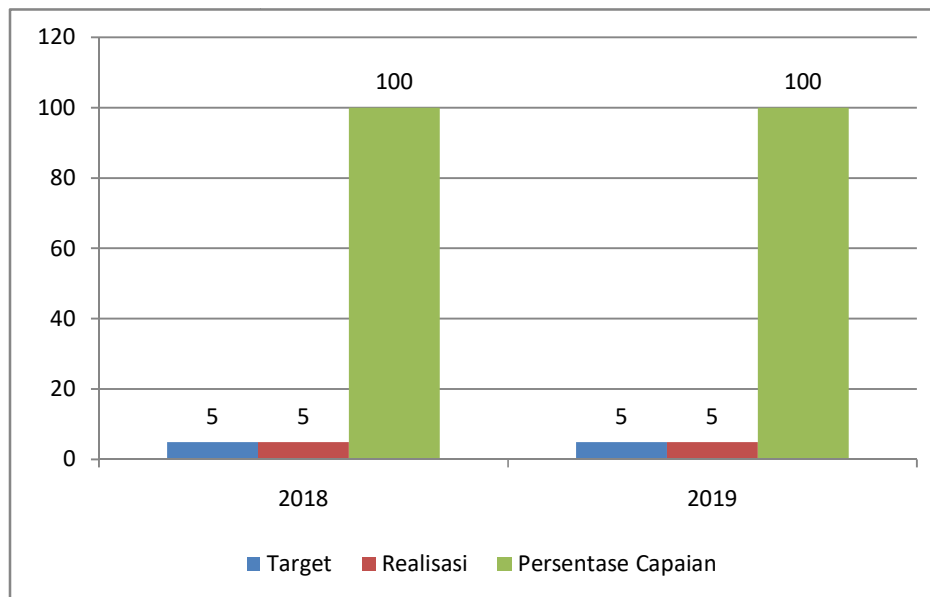
Capaian indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi adalah 100% yaitu dengan target 5 Pelabuhan/Bandara dan dapat direalisasikan sebanyak 5 Pelabuhan/Bandara. *Breakdown* dari indikator tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 17. Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

No	<i>Breakdown</i> Indikator	Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase (%)
1	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat layak/hygiene	5	5	100
2	Jumlah tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	5	5	100
TOTAL		5	5	100



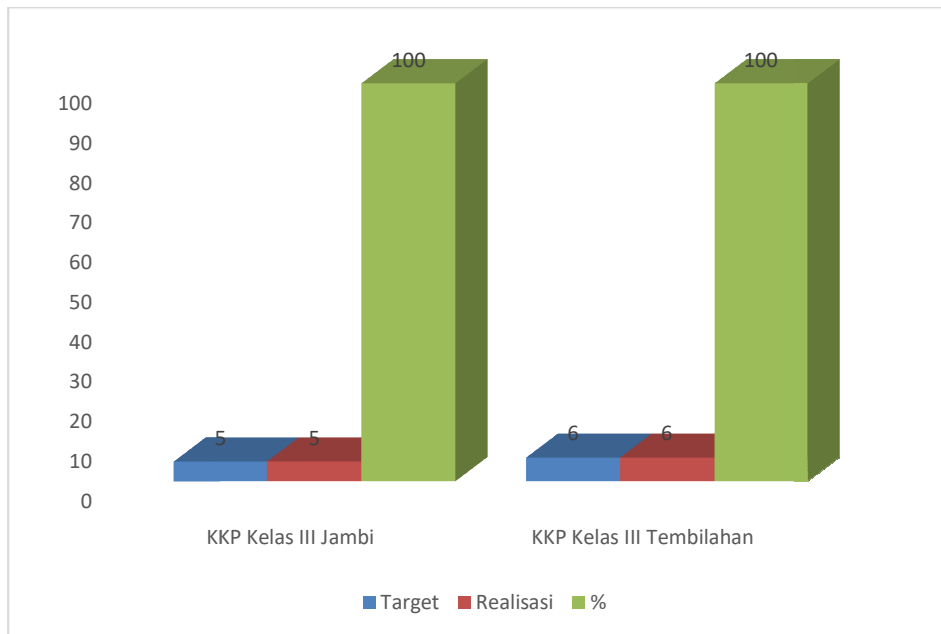
Grafik 22. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi tahun 2019



Grafik 29. Trend Capaian persentase Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi tahun 2018 s.d 2019

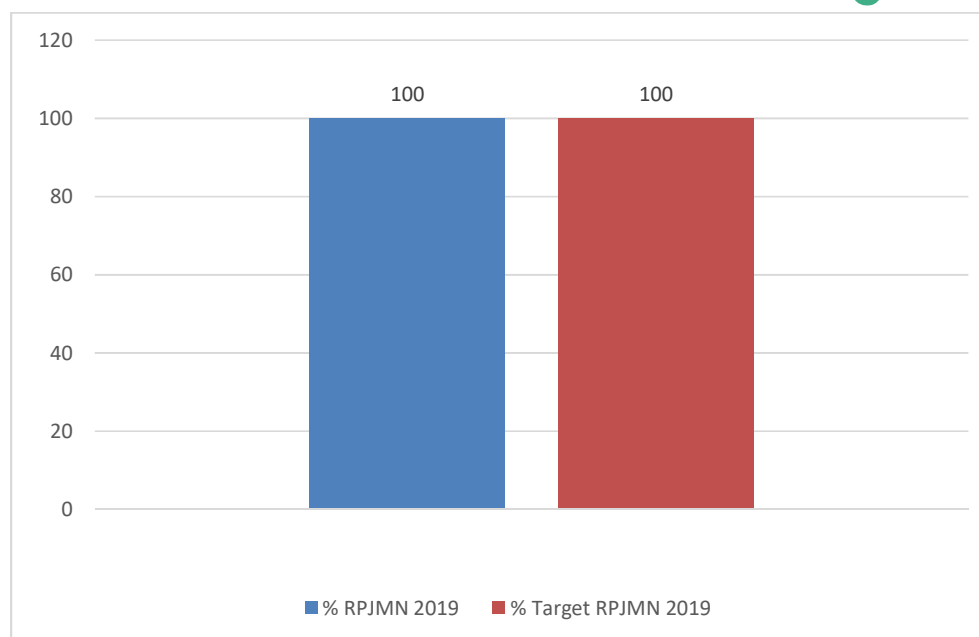
Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dua tahun terakhir cenderung stabil dengan persentase 100%. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan pihak maskapai komunitas pelabuhan dan bandara dalam menjada sanitasi lingkungan di sekitar wilayah pelabuhan/bandara.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2019 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan adalah sama yakni sebesar 100%.



Grafik 30. Perbandingan Realisasi Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% sudah mencapai target dari RPJMN tahun 2019 sebesar 100%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 31. Perbandingan realisasi indikator jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% sudah mencapai target dari RPJMN tahun 2019 sebesar 100%. Akan tetapi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan tidak adanya standar nasional yang ditetapkan untuk indikator kinerja “jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi di wilayah kerja KKP Kelas III Jambi”.

Indikator jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP Kelas III Jambi Tahun 2019. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 46.650.000,- dan serapan sebesar Rp. 46.650.000,- (100%).

- e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tercapainya indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :
- 1) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) di pelabuhan dan bandara secara berkala setiap bulannya.
  - 2) Penyuluhan kepada TPM-TPM di wilayah pelabuhan dan bandara akan pentingnya hygiene sanitasi TPM yang memenuhi syarat.



- 3) Pengawasan sarana PAB dan pemeriksaan sampel air bersih secara berkala setiap bulannya, diupayakan terlaksana sesuai target jumlah sampel yang diperiksa.
  - 4) Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan inspeksi sanitasi pada pihak-pihak terkait pada kegiatan pelayanan kesehatan haji embarkasi dan debarkasi sebagai dasar tindakan upaya perbaikan, agar sampel air, sarana penyediaan air bersih, tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, pengawasan vektor yang diperiksa dapat memenuhi syarat.
  - 5) Peningkatan koordinasi kepada lintas sektor tentang pengawasan sampel makanan calon jamaah haji.
  - 6) Peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan kepada lintas sektor, lintas program dan masyarakat yang berada disekitar wilayah kerja.
  - 7) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan tempat pengelola makanan.
- f. Analisa penyebab keberhasilan
- Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.
- g. Masalah yang dihadapi
- 1) Belum maksimalnya kerjasama dengan *stakeholder* dalam pemeriksaan kesehatan lingkungan sehingga beberapa kali terjadi *miss* komunikasi dan petugas dipersulit untuk melakukan pemeriksaan pada saat pelaksanaan kegiatan.
  - 2) Masih terdapat TPM yang belum memenuhi sarana prasarana yang memenuhi syarat ; tempat sampah yang tertutup, dan penataan bahan-bahan makanan yang belum tertata rapi.
  - 3) Kebersihan penjamah makanan pada TPM dalam pengolahan maupun penyajian makanan masih ditemukan kesadaran akan tingkat *hygiene* yang rendah.
  - 4) Distribusi air yang diterima pada *reservoir* di wilayah kerja Pelabuhan, air tidak jernih (berwarna), kemungkinan adanya kebocoran dalam pipa pendistribusian dari perusahaan pengelolaan air minum setempat.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Penguatan jejaring kerjasama dengan informasi dan sosialisasi mengenai pengawasan pemeriksaan kesehatan lingkungan dalam lingkup kegiatan PRL.
- 2) Sosialisasi dan koordinasi tentang SOP kegiatan pengendalian risiko lingkungan kepada *stakeholder* terkait.
- 3) Bekerjasama dengan Angkasa Pura, maskapai dan Pelindo mengenai rencana kegiatan pengawasan dan penyehatan lingkungan dalam lingkup PRL.
- 4) Peningkatan kapasitas penjamah makanan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan di kawasan Pelabuhan Talang Duku dan Bandara Sultan Thaha tentang *hygiene* sanitasi pengolahan maupun penyajian makanan sesuai standar kesehatan.
- 5) Pemeriksaan *rectal swab* pada penjamah makanan di kawasan Pelabuhan Talang Duku dan Bandara Sultan Thaha sebanyak 6 kali.
- 6) Memasukkan kegiatan pada tahun 2020 untuk meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan jejaring kerja terkait, bimbingan teknis maupun peningkatan kapasitas teknis agar memotivasi petugas untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan dalam lingkup PRL.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi adalah sebanyak 5 pelabuhan/bandara (100%) dan bila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100% yang berarti tidak terdapat efisiensi pembiayaan/sumber daya.

**8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area**

a. Pengertian

Pelabuhan/bandara baik perimeter (daerah dalam pagar pelabuhan yang diperuntukkan untuk kapal bersandar, lokasi gudang, tempat bongkar muat barang, kantor-kantor pemerintah dan swasta) dan *buffer area* (lingkungan luar pagar pelabuhan/bandara tempat pemukiman penduduk dengan radius 400 meter dari batas perimeter) yang melaksanakan kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga mencegah terjadinya penularan penyakit tular vektor, sehingga menjadikan wilayah pelabuhan/bandara tersebut bebas vektor.

b. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal  $\leq 1$ , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6.

c. Rumus/Cara Perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2015. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015-2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta rencana kinerja tahun berjalan. Berikut *detail* perhitungan realisasi indikator :

Jumlah pelabuhan/bandara = jumlah pelabuhan/bandara (yang memenuhi kriteria sesuai DO)

d. Capaian indikator

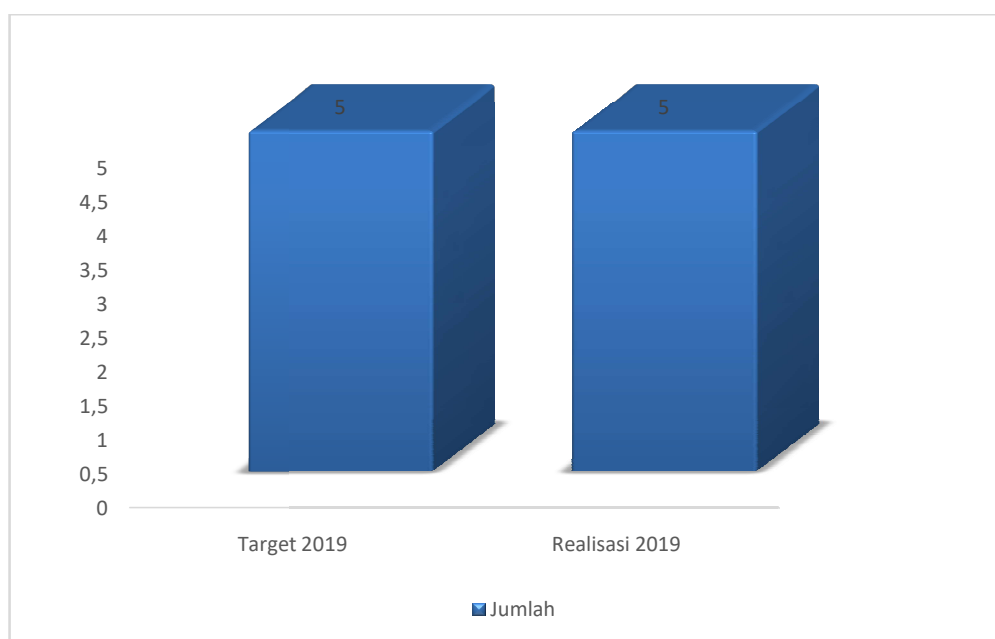
Capaian indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBDbebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area berhasil mencapai target yang ditetapkan. Angka pencapaian kinerjanya sebesar 100% pada 5 (lima) lokasi yang terdiri dari: Bandara Sultan Thaha, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Nipah Panjang, dan Pelabuhan Kuala Tungkal, dan target lokasi pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area 5 (lima) lokasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional bahwa terdapat lima komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya jumlah pelabuhan/bandara/PLBDbebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.

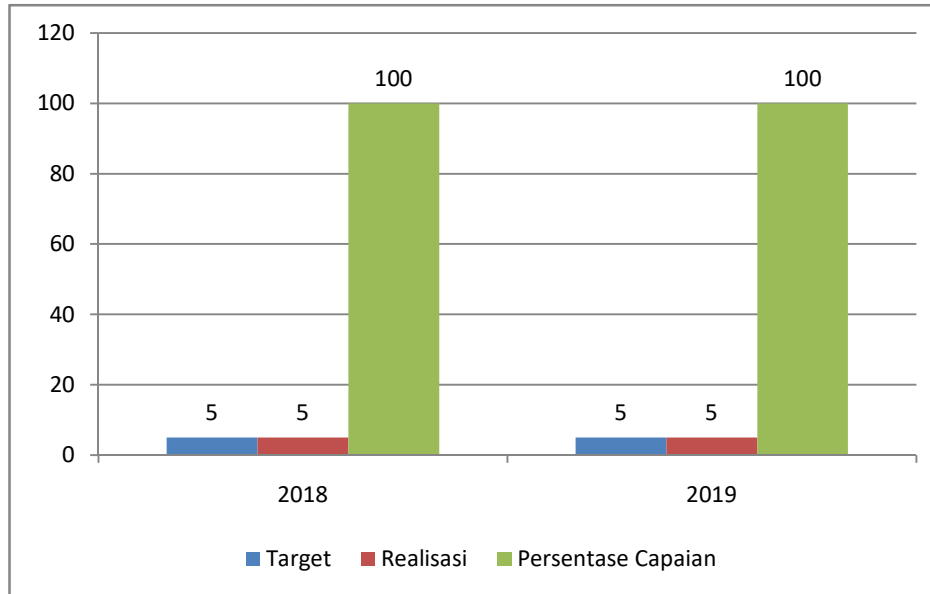
Capaian indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area adalah 100% yaitu dengan target 5 Pelabuhan/Bandara dapat direalisasikan sebanyak 5 Pelabuhan/Bandara. *Breakdown* dari indikator tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

No	Breakdown Indikator	Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase (%)
1	Layanan Survei Vektor Pes	5	5	100
2	Layanan Pengendalian Vektor Diare	5	5	100
3	Layanan Vektor Pengendalian Malaria	5	5	100
4	Layanan Survei Vektor DBD	5	5	100
5	Layanan Survei Vektor Diare	5	5	100
6	Layanan Survei Vektor Malaria	5	5	100
TOTAL		5	5	100

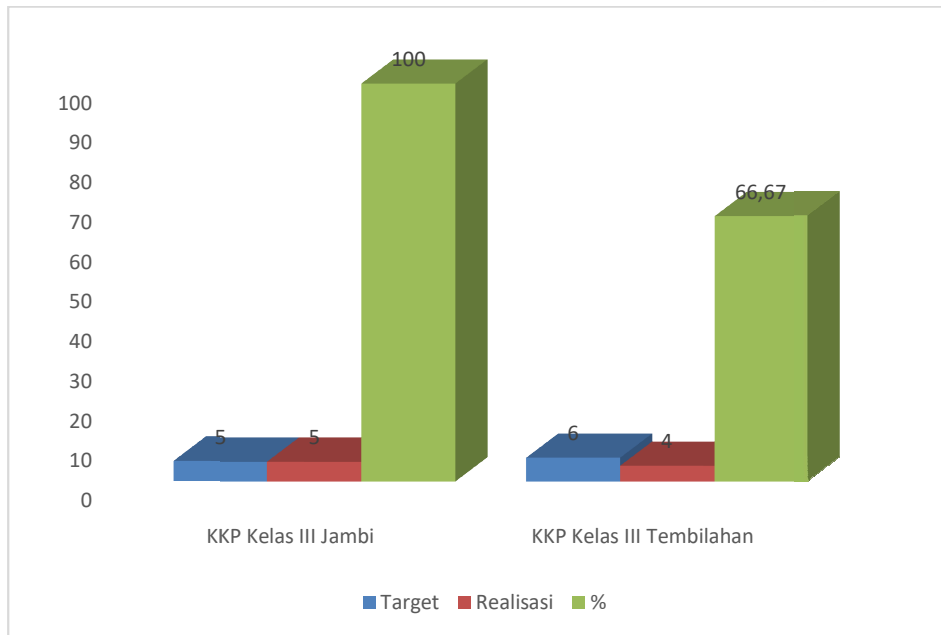


Grafik 32. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2019



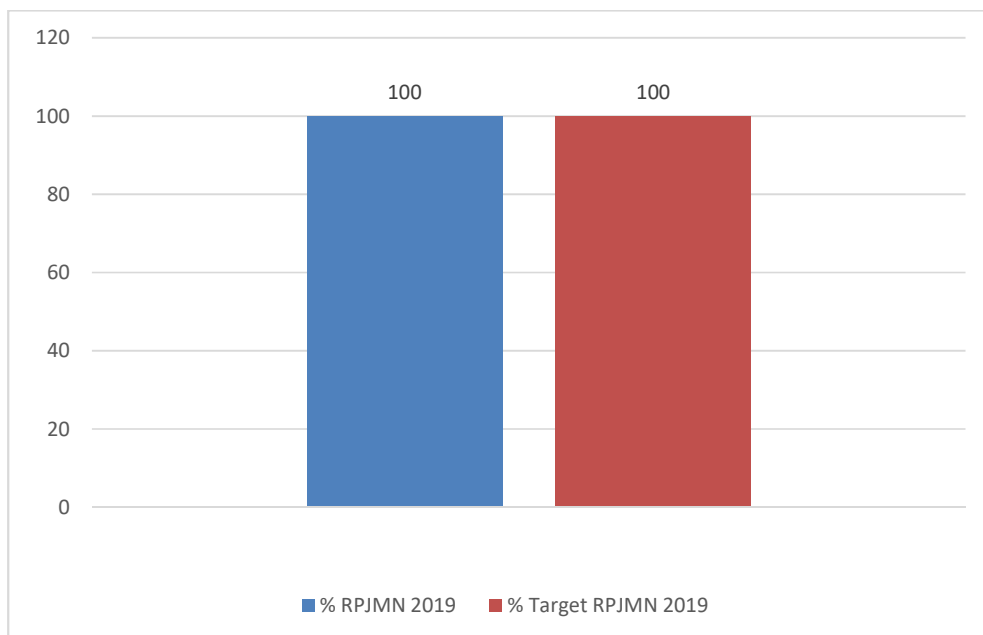
Grafik 33. Trend Capaian persentase Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2018 s.d 2019

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area Tahun 2019 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan adalah sama yakni sebesar 100%.



Grafik 34. Perbandingan Realisasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2019

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% sudah mencapai target dari RPJMN tahun 2019 sebesar 100%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 35. Perbandingan realisasi indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area Tahun 2019 dengan RPJMN tahun 2019

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN 2019 dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100% sudah mencapai target dari RPJMN tahun 2019 sebesar 100%. Akan tetapi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan tidak adanya standar nasional yang ditetapkan untuk indikator kinerja “jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area di wilayah kerja KKP Kelas III Jambi”.

Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP Kelas III Jambi Tahun 2019. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 179.343.000,- dan serapan sebesar Rp. 175.578.558,- (98%).

Tercapainya indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Pelaksanaan survei *Aedes spp* di wilayah perimeter dan *buffer area* secara berkala setiap bulannya, dengan menetapkan nilai HI dan CI untuk tiap-tiap RT dan pelabuhan disurvei di wilayah perimeter dan *buffer area* untuk target yang ditetapkan, yaitu *house index* = 0 dan *buffer area house index* < 1.
- 2) Pada saat pelaksanaan survei rutin diinformasikan kepada pemilik rumah/bangunan akan pentingnya upaya pengendalian vektor penyakit, tentang vektor yang dapat menyebabkan penyakit, tempat perindukannya, upaya pembasmian sehingga bebas dari vektor.
- 3) Pelaksanaan survei *Anopheles spp* di wilayah perimeter dan *buffer area* secara berkala setiap bulannya, dengan menetapkan nilai MHD dan MBR untuk tiap 2 RT disurvei.
- 4) Pengendalian tikus dan pinjal secara berkala di wilayah kerja pelabuhan dan bandara setiap 40 hari dengan jangka waktu pemasangan selama 5 hari berturut-turut menggunakan 250 perangkap setiap kali pemasangan. Dari hasil pengendalian juga dilakukan identifikasi dan penyisiran pinjal.
- 5) Pengendalian lalat secara berkala setiap bulan menggunakan metode spraying dengan bahan aktif *cypermethrine* 0,1% di kawasan pelabuhan dan bandara.
- 6) Pengendalian kecoa secara berkala setiap bulan menggunakan metode spraying dengan bahan aktif *cypermethrine* 0,1% di kawasan pelabuhan dan bandara.

e. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Belum maksimalnya kerjasama dengan *stakeholder* dan masyarakat dalam pengendalian vektor sehingga beberapa kali terjadi *miss* komunikasi dan petugas dipersulit untuk melakukan pemeriksaan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- 2) Wilayah kerja yang termasuk daerah pasang surut, dimana masyarakat biasa menampung air dalam wadah-wadah besar, tidak tertutup dan dalam waktu yang lama, menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian vektor penular penyakit

g. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Penguatan jejaring kerjasama dengan informasi dan sosialisasi mengenai pengendalian vektor dalam lingkup kegiatan PRL.
- 2) Sosialisasi dan koordinasi tentang SOP kegiatan pengendalian risiko lingkungan kepada *stakeholder* terkait.
- 3) Bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura, maskapai dan Pelindo mengenai rencana kegiatan pengendalian vektor dalam lingkup PRL.
- 4) Melakukan upaya sosialisasi, penyuluhan dan pemberian informasi aktif kepada masyarakat tentang pentingnya wilayah bebas vektor penular penyakit
- 5) Melakukan pembentukan dan pelatihan kader dari masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara di setiap wilayah kerja untuk *perimeter* area maupun *buffer area*

h. Analisis efisiensi sumber daya

Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBDbebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area adalah 100% dan bila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100% yang berarti tidak terdapat efisiensi pembiayaan.



## 9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

### a. Pengertian

Terlaksananya rangkaian kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung dalam rangka membangun sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap kemungkinan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di pelabuhan/ bandara/ PLBD melalui kegiatan skrining dan sosialisasi penyakit menular.

### b. Definisi operasional

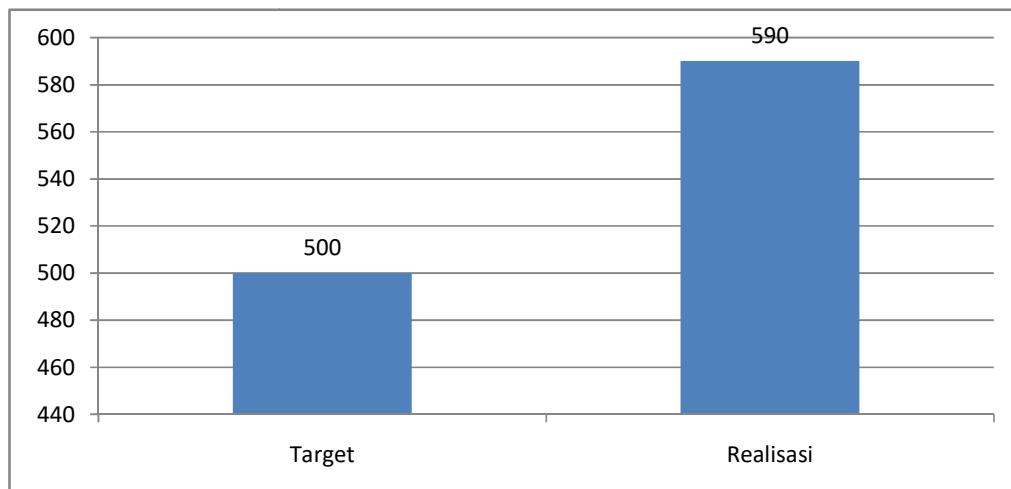
Jumlah prang yang mengikuti dan atau melakukan skrinning penyakit menular HIV/AIDS dan TBC.

### c. Rumus/Cara Perhitungan

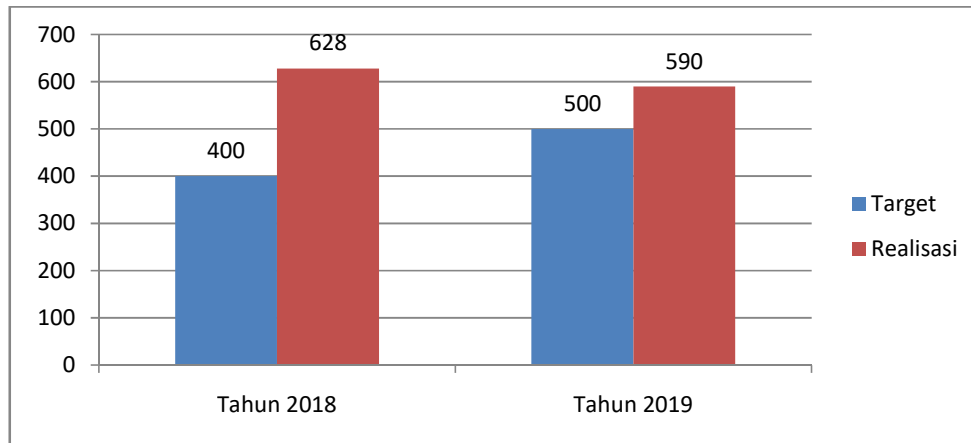
Indikator 9 = jumlah orang yang melakukan skrinning penyakit HIV + jumlah orang yang melakukan skrinning penyakit TB

### d. Capaian indikator

Capaian indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit HIV dan TBC di tahun 2019 adalah sebesar 118 %, dimana diperoleh dari target 500 orang dan terealisasi 590 orang. Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dapat dilihat pada diagram berikut ;

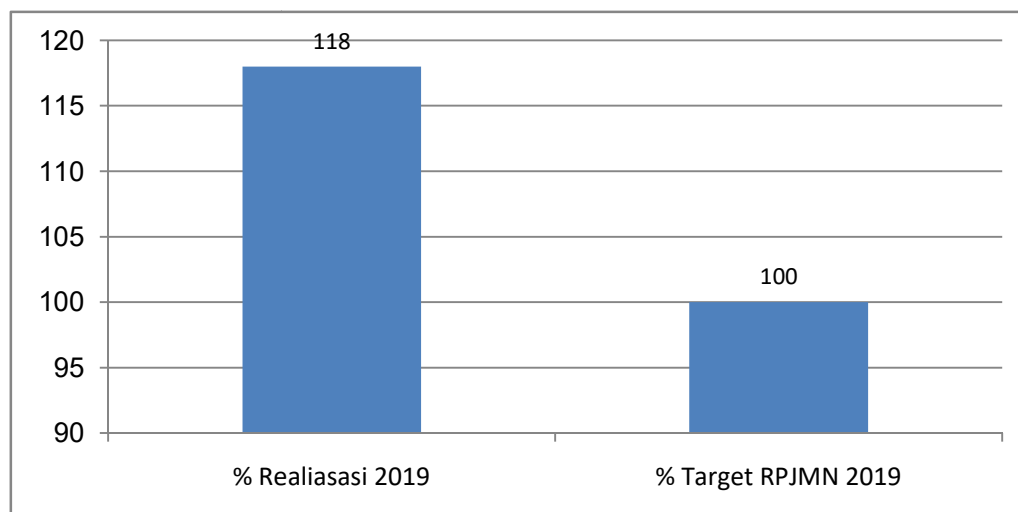


Grafik 236. Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung tahun 2019



Grafik 247. Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung tahun 2018 dan 2019

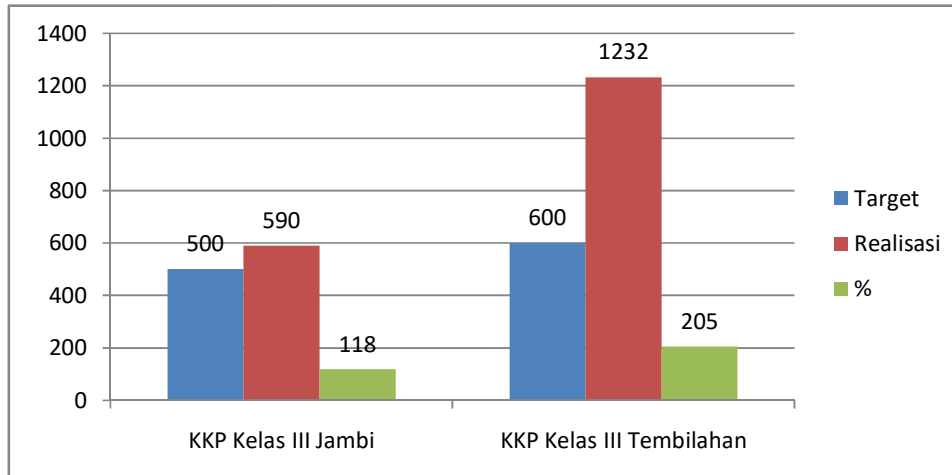
Untuk melihat progress pencapaian target RPJMN, kita bisa melihat perbandingan realisasi 2019 terhadap target RPJMN tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 38. Perbandingan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung Tahun 2019 dengan RPJMN 2019

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa realisasi tahun 2019 jauh melampaui target RPJMN tahun 2019 yaitu Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 100%, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang berminat melakukan skrining dan mengikuti sosialisasi penyakit menular. Akan tetapi realisasi indikator ini tidak bisa diperbandingkan dengan standar nasional karena tidak adanya standar nasional untuk indikator ini.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dimana pada indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2019 lebih rendah (118%) jika dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (205%)



Grafik 39. Perbandingan realisasi indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan instansi sejenis tahun 2019

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

- 1) Mengadakan pertemuan sosialisasi penyakit HIV dan TB sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pekerja di lingkungan pelabuhan/bandara tentang penyakit tersebut dengan Nara sumber dari P2PML
- 2) Pengadaan bahan *screening* HIV/AIDS dan pelaksanaan *screening* HIV/ AIDS ke Kuala Tungkal dan Muara Sabak dengan menggunakan rapid test HIV sebagai salah satu upaya penemuan/deteksi dini penyakit HIV/AIDS guna mendapat pengobatan sedini mungkin.
- 3) Melakukan kordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terkait program kegiatan deteksi dini terduga TB yang termasuk area bufer perimeter dalam pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan pendekatan lebih dalam kepada para sasaran terduga TB agar kooperatif dalam pengambilan sample dahak
- 5) Peningkatan kualitas SDM bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kemampuan, *refreshing* pengetahuan di bidang teknis dan non teknis guna menunjang kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung oleh KKP. Peningkatan kualitas SDM tersebut berupa

konsultasi ke Subdit HIV dan TB membahas masalah HIV/ AIDS dan TB di wilayah kerja KKP dan pengadaan alat rapid test dari pusat.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pada kegiatan surveilans HIV/AIDS pada ABK tidak semua ABK berada di kapal sehingga tidak bisa mengikuti sosialisasi.
- 2) Tidak semua ABK setuju dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS
- 3) Belum semua wilker mendapatkan sosialisasi tentang penyakit TB dikarenakan keterbatasan anggaran.
- 4) Untuk kegiatan skrining penyakit menular TBC sangat sulit dalam pengambilan sample dahak dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya mendeteksi dini penyakit TBC sedari awal

g. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan kegiatan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Meningkatkan upaya promosi kesehatan salah satunya dengan pembuatan brosur, spanduk dan mengadakan penyuluhan terhadap ABK dan masyarakat sekitar pelabuhan tentang tentang penyakit menular HIV/AIDS dan TBC.
- 2) Pemberian penjelasan pada pasien tentang manfaat dan pentingnya pemeriksaan HIV/AIDS dan peningkatan kegiatan penjangkauan pada populasi berisiko
- 3) Membuat usulan tambahan kegiatan di sosialisasi tentang TB pada anggaran tahun 2019 bagi wilker.
- 4) Melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada sasaran terduga TB agar lebih kooperatif dalam pengambilan sample dahak dan tidak lupa agar terus di follow up dalam pengambilan sample dahak

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp.157.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp.153.862.691,- (97,7%). Anggaran yang terealisasi sebesar 97,7 % sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 118% (target 500 dan terealisasi 590), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,3%.

## 10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

### a. Pengertian

Dokumen pelaporan adalah kumpulan tulisan yang berisi pertanggungjawaban kinerja selama periode satu tahun yang didukung oleh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berjalannya program KKP Kelas III Jambi

### b. Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di KKP Kelas III Jambi sebanyak 11 jenis Dokumen dalam periode satu tahun antara lain :

1. RKAKL/DIPA
2. Laporan Tahunan
3. Laporan Keuangan
4. Laporan BMN
5. Lakip
6. Profil
7. Proposal PNBP
8. Dokumen Kepegawaian
9. Laporan e monev DJA
10. Laporan e monev Bappenas
11. LEB (Laporan Eksekutif Bulanan)

### c. Rumus/ Cara Perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2019. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015 – 2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta Rencana Kinerja Tahunan tahun berjalan. Rumus/cara perhitungan untuk indikator 10 adalah akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan Keuangan (semester I dan II) 2 dok, Laporan BMN (semester I dan II) 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian (kontrak dan penilaian) 2 dok, e-monev DJA (bulanan) 12 dok, e-monev Bappenas (triwulan) 4 dok, LEB (bulanan) 12 dok.

Indikator 10 =  $\sum$  RKAKL/DIPA + Laptah + Laporan Keuangan + Laporan BMN + Lakip + Profil + Proposal PNBP + Dokumen Kepegawaian + Laporan e-monev DJA + Laporan e-monev Bappenas + LEB

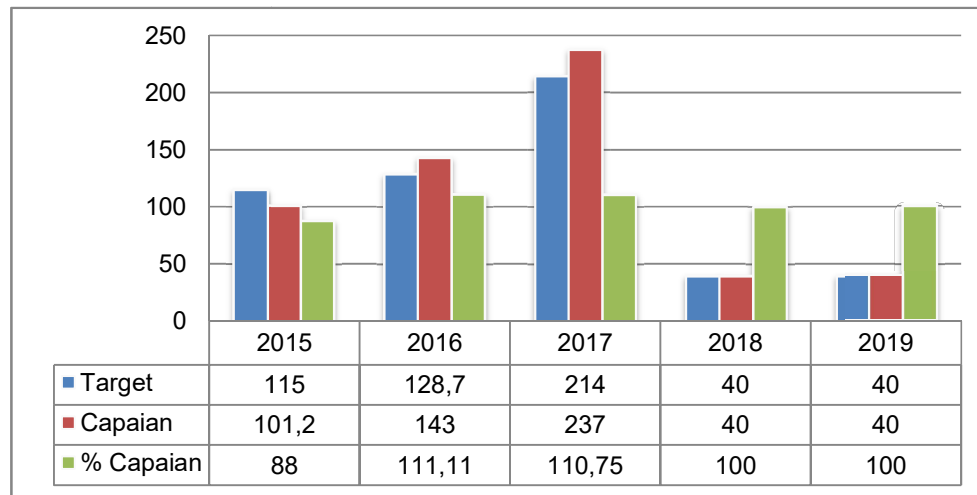
d. Capaian Indikator

Persentase capaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dicapai melalui kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit adalah 100% yaitu dari target 40 dokumen terealisasi sebanyak 40 dokumen. Berikut besaran target dan realisasi masing-masing dokumen yang terdapat dalam indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tahun 2019 :

Tabel 19. Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2019

No	Jenis Dokumen	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	RKAKL/DIPA	2	2	100
2	Laporan Tahunan	1	1	100
3	Laporan Keuangan	2	2	100
4	Laporan BMN	2	2	100
5	Lakip	1	1	100
6	Profil	1	1	100
7	Proposal PNBP	1	1	100
8	Dokumen Kepegawaian	2	2	100
9	Laporan emonev DJA	12	12	100
10	Laporan emonev Bappenas	4	4	100
11	LEB	12	12	100
Jumlah		40	40	100

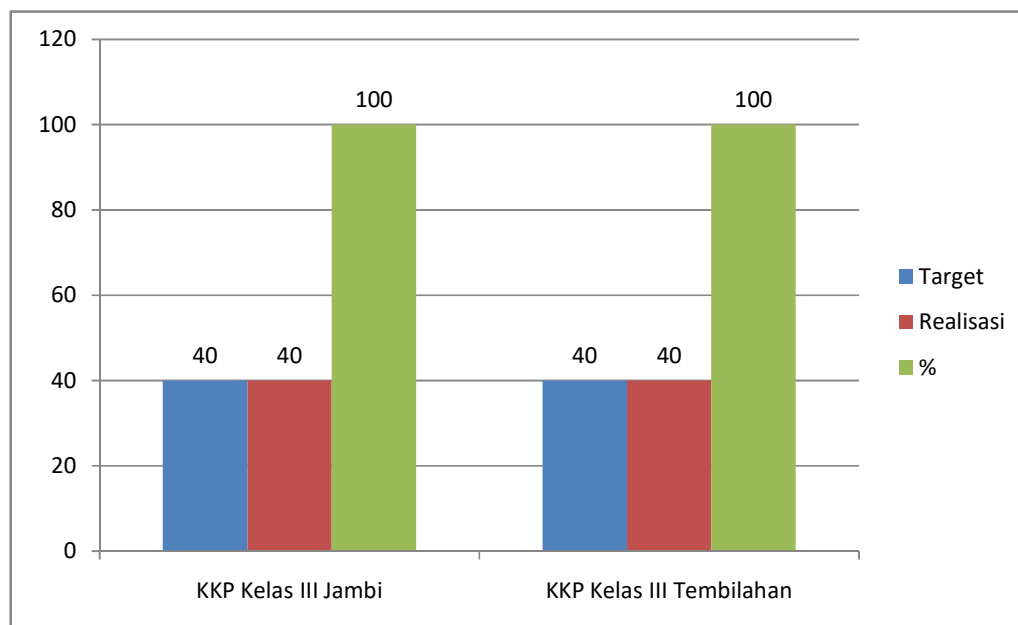
Trend pencapaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 40. Perbandingan Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d. 2019

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya selama lima tahun terakhir cenderung naik dan turun. Capaian indikator dari tahun 2015-2016 terjadi peningkatan 23,11%. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0,36%. Capaian indikator pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 10,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017). Hal ini dikarenakan adanya perubahan defenisi operasional yang pada tahun sebelumnya terdapat kegiatan pengadaan sarana prasarana dan pelatihan pada indikator ini, sedangkan pada tahun ini kegiatan pengadaan sarana prasarana dipisahkan menjadi indikator tersendiri. Untuk tahun 2019 tidak terdapat perbedaan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini karena defenisi operasionalnya juga sama dan dokumennya merupakan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan rutin setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis (dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan) untuk indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2019 realisasi KKP Kelas III Jambi sama dengan realisasi KKP Kelas III Tembilahan (100%).



Grafik 41. Perbandingan realisasi indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 6) Berkoordinasi dengan Pusat untuk mendapatkan dokumen yang akuntabel, representatif, dan komprehensif dalam rangka menunjang dan memfasilitasi kegiatan dan kinerja KKP Kelas III Jambi
- 7) Berkoordinasi dengan Lintas Sektor (seperti KPPN dan KPKNL) dan Bagian Keuangan dan BMN Ditjen P2P untuk mendapatkan laporan keuangan dan BMN yang akuntabel
- 8) Kerja sama dengan seluruh pegawai di KKP Kelas III Jambi untuk mengumpulkan dokumen kepegawaian
- 9) Kerja sama antar seksi di KKP Kelas III Jambi serta Bagian Pusat dan Informasi (PI) Ditjen P2P untuk menghasilkan laporan e-monev DJA, e-monev Bappenas, LEB, laporan tahunan, Lakip, dan profil.
- 10) Membuat estimasi penerimaan pendapatan oleh bendahara penerima untuk dapat dituangkan dalam proposal PNB



f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain sumber daya manusia yang melaksanakan dukungan manajemen telah cukup tersedia, adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan *stakeholder* di lingkungan KKP Kelas III Jambi.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Jaringan internet yang kurang lancar sehingga mempengaruhi proses input data untuk laporan yang berbasis *online*
- 2) Adanya kesibukan dari pihak terkait untuk menjalankan tupoksinya terlebih dahulu dibandingkan dengan tugas tambahan yang lain
- 3) Belum adanya sanksi yang tegas dapat diberikan kepada pihak terkait dari adanya pelanggaran peraturan terkait.

h. Upaya pemecahan masalah

- 1) Meningkatkan komunikasi, koordinasi antara program dengan bagian dukungan manajemen di lingkungan KKP Kelas III Jambi baik dari lingkup pegawai hingga struktural.
- 2) Meningkatkan upaya lebih aktif dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan KKP Kelas III Jambi.
- 3) Melakukan upaya perbaikan mutu dukungan manajemen sebagai *support* program untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka TUPOKSI pencapaian program.

i. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp.10.064.854.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.800.808.784,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 97,37% sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 100% (target 40 dan realisasi 40), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,63%.

## 11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

a. Pengertian

Peningkatan kapasitas SDM bidang P2P adalah proses untuk menjadikan SDM KKP Kelas III Jambi lebih dapat meningkatkan kinerjanya untuk menunjang

program bidang P2P melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi ke pusat, atau kursus.

b. Definisi Operasional

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP Kelas III Jambi dalam kurun waktu satu tahun

c. Rumus/Cara Perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2018. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015–2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta Rencana Kinerja Tahunan tahun berjalan. Rumus/cara perhitungan untuk indikator 11 adalah Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Indikator 11} = \sum \text{pelatihan} + \text{training} + \text{kursus}$$

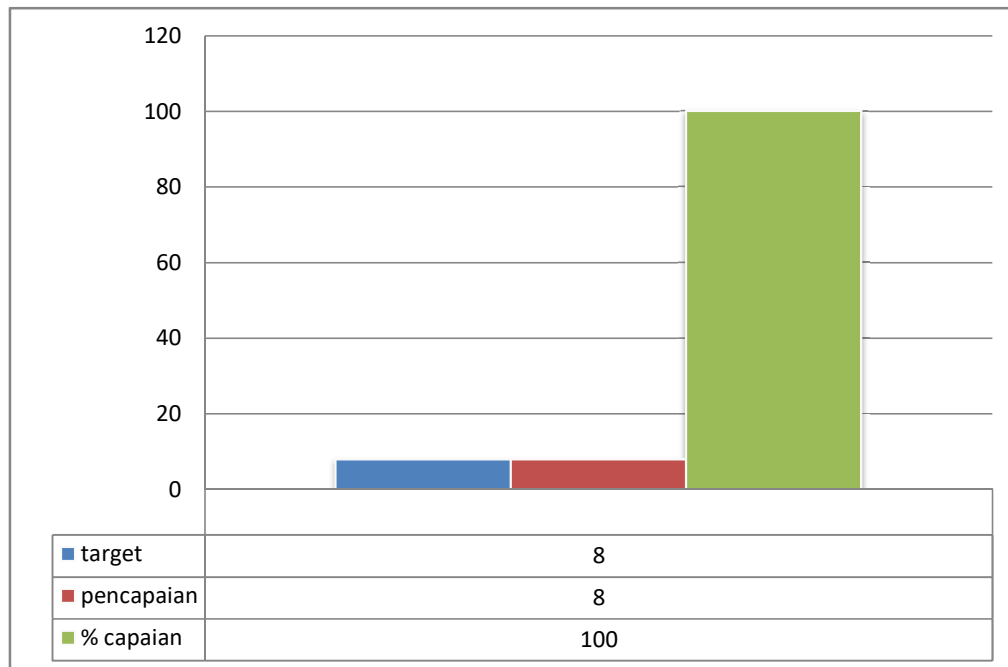
d. Capaian Indikator

Persentase capaian indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P adalah 100% yaitu dari target 8 pelatihan terealisasi sebanyak 8 pelatihan. Berikut besaran target dan realisasi masing-masing jenis pelatihan yang terdapat dalam indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tahun 2019 :

Tabel 20. Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P Tahun 2019

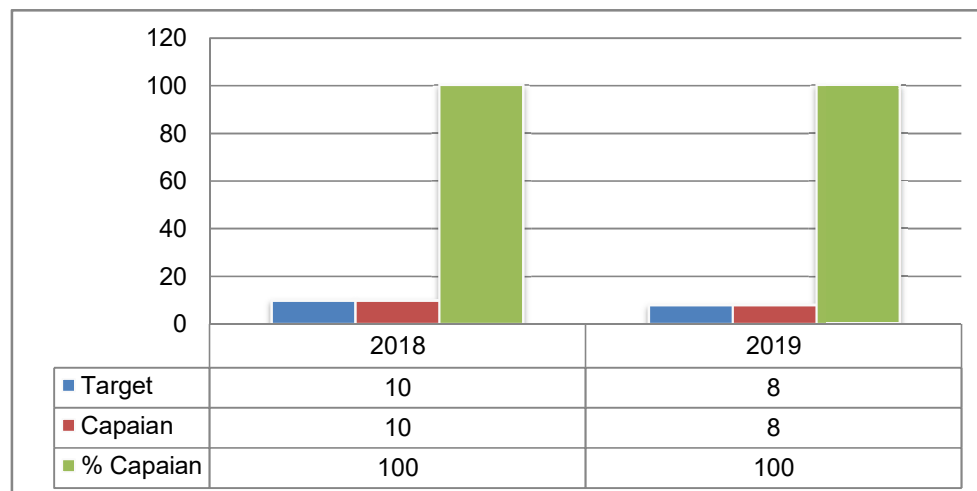
No	Jenis Pelatihan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Peningkatan Kapasitas Petugas PRL	1	1	100
2	Pelatihan ACLS	1	1	100
3	Pelatihan ATLS	1	1	100
4	Pelatihan Vaksinasi Dokter	1	1	100
5	Pelatihan Vaksinasi Perawat	1	1	100
6	Peningkatan Kapasitas Teknis Karantina dan Surveilans	1	1	100
7	Peningkatan Kapasitas SDM PBJ dan PPK	1	1	100
8	Workshop Monev PBJ	1	1	100
Jumlah		8	8	100

Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 42. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P Tahun 2019

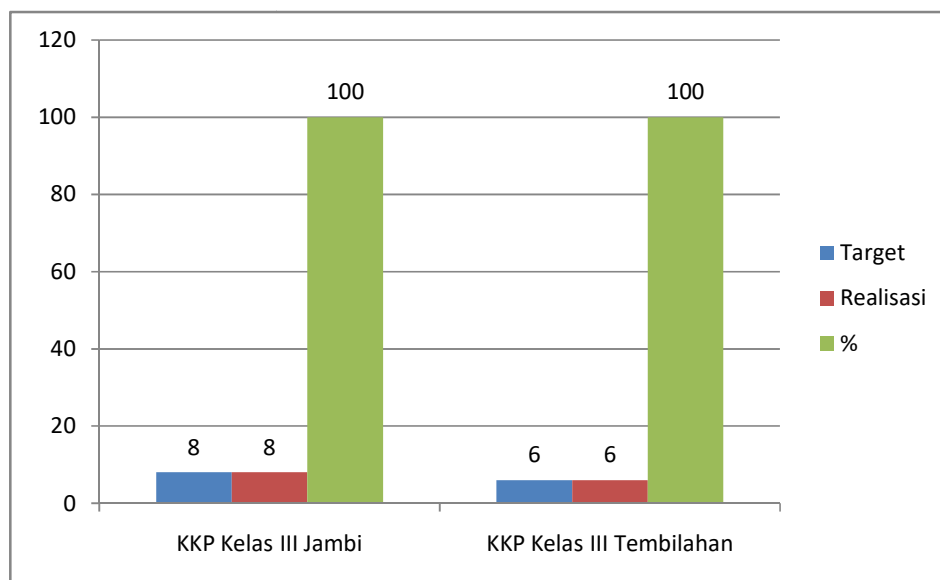
Trend pencapaian indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P hanya dapat dibandingkan dalam dua tahun terakhir karena defenisi operasionalnya sama. Trend pencapaian indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 43. Perbandingan Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P Tahun 2018 s.d. 2019

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P selama dua tahun terakhir adalah sama (100%). Untuk tahun 2019 tidak terdapat perbedaan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2018, karena semua target pelatihan yang direncanakan pada tahun 2019 dapat terlaksana.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis (dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan) untuk indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P pada tahun 2019 realisasi KKP Kelas III Jambi sama dengan realisasi KKP Kelas III Tembilahan yaitu 100%.



Grafik 44. Perbandingan realisasi indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Tersedianya anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi ke pusat, atau workshop.
- 2) Menghubungi pihak penyelenggara kegiatan untuk mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan.

3) Melakukan konsultasi atau mengikuti bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang P2P

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya dapat memenuhi jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.

g. Masalah yang dihadapi

Waktu pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan undangan dari Pusat ataupun pihak penyelenggara.

h. Upaya pemecahan masalah

- 1) Tetap memantau waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan undangan yang akan diterima
- 2) Mempersiapkan SDM yang akan mengikuti pelatihan sehingga dapat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan.

i. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp 157.277.000,- dan teralisasi sebesar Rp 153.763.706,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 97,77% sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 100% (target 8 dan realisasi 8), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,23%.

## 12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

a. Pengertian

Pengadaan sarana dan prasarana adalah pembelian unit sarana dan prasarana yang direalisasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Jambi.

b. Pengertian

Pengadaan sarana dan prasarana adalah pembelian unit sarana dan prasarana yang direalisasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Jambi.

c. Definisi Operasional

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, atau kendaraan di KKP Kelas III Jambi dalam satu tahun

d. Rumus/ Cara Perhitungan

Asumsi target dibuat berdasarkan capaian dan realisasi tahun 2017. Estimasi target disesuaikan dengan RAK 2015 – 2019 dan diaplikasikan dalam perjanjian kinerja serta Rencana Kinerja Tahunan tahun berjalan. Rumus/cara perhitungan untuk indikator 12 adalah Akumulasi jumlah pengadaan tanah (0), gedung (0), alat kesehatan (3 unit), fasilitas penunjang perkantoran (27 unit), dan kendaraan (0) dalam satu tahun.

$$\text{Indikator 12} = \sum \text{pengadaan tanah} + \text{gedung} + \text{alat kesehatan} + \text{fasilitas penunjang perkantoran} + \text{kendaraan}$$

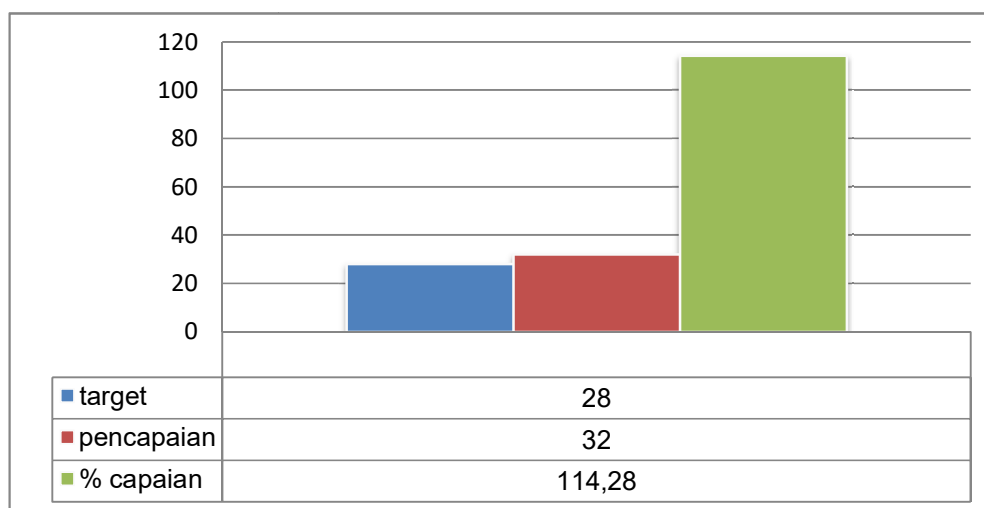
e. Capaian Indikator

Persentase capaian indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana adalah 114,28% yaitu dari target 28 unit terealisasi sebanyak 32 unit. Berikut besaran target dan realisasi masing-masing unit sarana prasarana yang terdapat dalam indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana tahun 2019 :

Tabel 21. Target, Realisasi dan Persentase Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2019

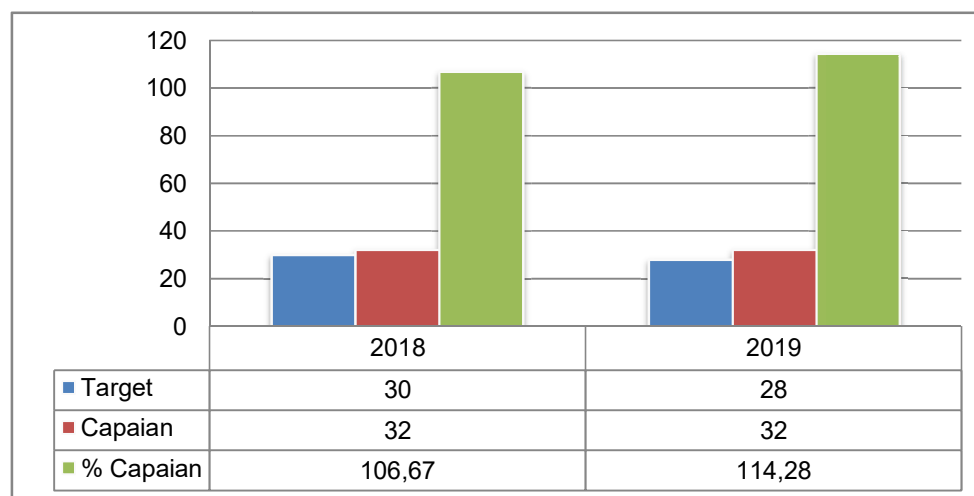
No	Jenis Sarana Prasarana	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	PC	3	4	133,33
2	Website	1	1	100
3	Genset	3	3	100
4	Kursi Tunggu Wilker	4	5	125
5	Kursi Tunggu Ruang Pelayanan	3	3	100
6	Kursi Tamu Wilker	3	3	100
7	AC 1 PK	1	2	200
8	AC ½ PK	1	2	200
9	Stabilizer	4	4	100
10	Brancard	1	1	100
11	Kursi Roda	2	2	100
12	Tandu	2	2	100
Jumlah		28	32	114,28

Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah pengadaan sarana prasarana dapat dilihat pada grafik di bawah ini



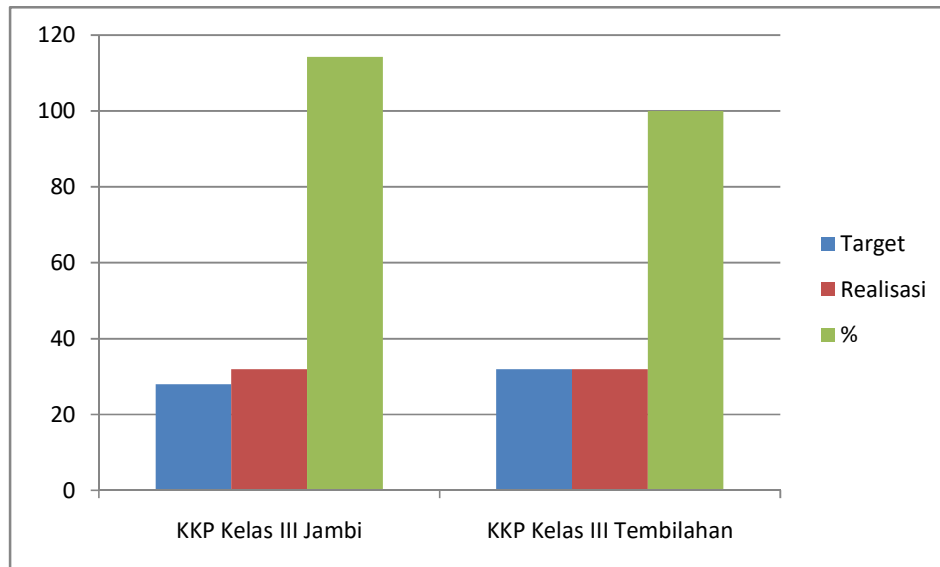
Grafik 45. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2019

Trend pencapaian indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana hanya dapat dibandingkan dalam dua tahun terakhir karena defenisi operasionalnya sama. Trend pencapaian indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 7,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis (dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan) untuk indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana pada tahun 2019 realisasi KKP Kelas III Jambi lebih tinggi 14,28% dari realisasi KKP Kelas III Tembilahan (100%). Hal ini disebabkan adanya perbedaan jumlah target yang akan dicapai dalam penetapan perjanjian kinerja.



Grafik 47. Perbandingan realisasi indikator sarana dan prasarana KKP Kelas III Jambi dengan instansi sejenis tahun 2019

f. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Berkoordinasi dengan Pusat untuk mendapatkan persetujuan usulan untuk perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
- 2) Berkoordinasi dengan seksi/program KKP Kelas III Jambi untuk menginventarisir sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan program KKP Kelas III Jambi
- 3) Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang membantu menyediakan pengadaan sarana prasarana

g. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain hubungan yang terjalin baik dengan semua pihak yang terkait pelaksanaan pengadaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan tersebut.



h. Masalah yang dihadapi

Keberadaan pihak ketiga di luar daerah Jambi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang dan memerlukan waktu jika ada kesalahan dalam pemberkasan.

i. Upaya pemecahan masalah

- 1) Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana dari awal tahun
- 2) Meminimalisir kesalahan dalam pemberkasan sehingga proses pencairan anggaran dapat dipercepat

j. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah Rp 251.260.000,- dan teralisasi sebesar Rp 247.329.700,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 98,43% sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 114,28% (target 28 dan realisasi 32), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,85%.

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 1 adalah sebesar Rp. 87.072.000. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan.	87.072.000	86.982.000	99,9

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kumulatif
Januari	87.072.000	9.338.000	10,72
Februari	87.072.000	9.712.000	21,88
Maret	87.072.000	10.192.000	33,58
April	87.072.000	11.466.000	46,75
Mei	87.072.000	7.794.000	55,70
Juni	87.072.000	8.712.000	65,71
Juli	87.072.000	7.768.000	74,63
Agustus	87.072.000	7.378.000	83,10
September	87.072.000	7.798.000	92,06
Oktober	87.072.000	4.994.000	97,79
November	87.072.000	1.830.000	99,90
Desember	87.072.000	0	99,90
Jumlah	87.072.000	86.982.000	

## b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2015 – 2019

Berikut ditampilkan tren pagu dan realisasi anggaran indikator 1 dari tahun 2015 – 2019

Tabel 104. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019 Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	681.978.000	453.728.545	66.53
2016	1.073.800.000	1.064.297.191	99.12
2017	191.850.000	181.950.000	94.84
2018	36.000.000	36.000.000	100
2019	87.072.000	86.982.000	99,9

## 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

### a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 2 adalah sebesar Rp. 85.700.000. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Persentaserespon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	85.700.000	85.700.000	100

Tabel 26. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Januari	85.700.000	5.400.000	7,84
Februari	85.700.000	5.700.000	12,95
Maret	85.700.000	6.750.000	20,83
April	85.700.000	5.400.000	27,13
Mei	85.700.000	5.400.000	33,43
Juni	85.700.000	10.500.000	45,68
Juli	85.700.000	5.400.000	51,98
Agustus	85.700.000	5.400.000	58,28
September	85.700.000	6.750.000	66,16
Oktober	85.700.000	9.800.000	77,60
November	85.700.000	12.450.000	92,12
Desember	85.700.000	6.750.000	100,00
Jumlah	85.700.000	85.700.000	

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2015 – 2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2013 – 2019 :

Tabel 27. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019 Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	672.561.00	554.126.910	82,39
2016	424.693.000	423.966.975	99,83
2017	108,320,000	108,320,000	100
2018	106.388.000	105.769.200	99,4
<b>2019</b>	<b>85.700.000</b>	<b>85.700.000</b>	<b>100</b>

**3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit**

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 3 adalah sebesar Rp. 78.728.000. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019

Tabel 118. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	78.728.000	78.728.000	100

Tabel 29. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kumulatif
Januari	78.728.000	3.500.000	4,45
Februari	78.728.000	4.050.000	9,59
Maret	78.728.000	4.050.000	14,73
April	78.728.000	4.050.000	19,88
Mei	78.728.000	4.050.000	25,02
Juni	78.728.000	37.778.000	73,01
Juli	78.728.000	3.500.000	77,45
Agustus	78.728.000	2.950.000	81,20

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kumulatif
September	78.728.000	5.950.000	88,76
Oktober	78.728.000	2.950.000	92,51
November	78.728.000	2.950.000	96,25
Desember	78.728.000	2.950.000	100,00
Jumlah	78.728.000	78.728.000	

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2015 – 2018

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2014 – 2018 :

Tabel 30. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Tahun 2015 – 2018  
Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	117.581.000	111.527.800	94,85
2016	336.640.000	306.919.663	91,17
2017	253.953.000	252.065.000	99,26
2018	148.596.000	145.036.000	97,60
2019	78.728.000	78.728.000	100

#### 4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 4 adalah sebesar Rp.267.500.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019 :

Tabel 31. Pagu dan realisasi anggaran Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	267.500.000	267.500.000	100

Tabel 32. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	267.500.000	0	0
Februari	267.500.000	0	0
Maret	267.500.000	0	0
April	267.500.000	0	0
Mei	267.500.000	0	0
Juni	267.500.000	14.500.000	5,42
Juli	267.500.000	5.800.000	2,16
Agustus	267.500.000	137.920.000	51,56
September	267.500.000	97.020.000	36,27
Oktober	267.500.000	0	0
November	267.500.000	0	0
Desember	267.500.000	12.260.000	4,58
Jumlah	267.500.000	267.500.000	100

## b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2014 – 2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2014–2019 :

Tabel 33. Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2014–2019 Indikator 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2014	219.947.000	197.565.200	89,82
2015	529.977.000	414.204.318	78,15
2016	237.874.000	116.069.622	48,8
2017	715.379.000	621.973.621	86,94
2018	224.620.000	224.620.000	100
2019	267.500.000	267.500.000	100

## 5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

### a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 5 adalah sebesar Rp. 68.700.000. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019

Tabel 34. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	68.700.000.	68.572.574	99,81

Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% per bulan
Januari	68.870.000	0	0,00
Februari	68.870.000	0	0,00
Maret	68.870.000	0	0,00
April	68.870.000	0	0,00
Mei	68.870.000	0	0,00
Juni	68.870.000	0	0,00
Juli	68.870.000	0	0,00
Agustus	68.870.000	0	0,00
September	68.870.000	0	0,00
Oktober	68.870.000	38.870.000	56,44
November	68.870.000	29.702.574	99,57
Desember	68.870.000	0	99,57
Jumlah	68.870.000	68.572.574	

## b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2015 – 2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2015 – 2019 :

Tabel 36. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 Indikator 5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	202.860.000	202.225.500	99,69
2016	281.200.000	193.761.519	68,91
2017	106,388,000	105,769,200	99,42
2018	78.761.000	78.600.700	99,80
2019	68.870.000	68.572.574	99,57

## 6. Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

## a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 6 adalah sebesar Rp. 74.037.000,-.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019 :

Tabel 37. Pagu dan realisasi anggaran Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah sertifikat/ surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	74.037.000	74.037.000	100

Tabel 128. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	74.037.000	5.100.000	6,88
Februari	74.037.000	5.100.000	6,88
Maret	74.037.000	17.937.000	24,23
April	74.037.000	5.100.000	6,88
Mei	74.037.000	5.100.000	6,88



Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Juni	74.037.000	5.100.000	6,88
Juli	74.037.000	5.100.000	6,88
Agustus	74.037.000	5.100.000	6,88
September	74.037.000	5.100.000	6,88
Oktober	74.037.000	5.100.000	6,88
November	74.037.000	5.100.000	6,88
Desember	74.037.000	5.100.000	6,88
Jumlah	74.037.000	74.037.000	100

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2014–2019

Berikut ditampilkan Perbandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2014-2019:

Tabel 39. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2014–2019 Indikator 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2014	53.280.000	52.240.000	98,01
2015	57.600.000	57.600.000	100
2016	326.177.000	54.000.000	16,55
2017	28.936.000	28.800.000	99,53
2018	32.400.000	32.400.000	100
2019	74.037.000	74.037.000	100

## 7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 7 adalah sebesar Rp 46.650.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019 :

Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	46.650.000	46.650.000	100

Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	46.650.000	2.250.000	5
Februari	46.650.000	9.500.000	25
Maret	46.650.000	5.875.000	38
April	46.650.000	5.875.000	50
Mei	46.650.000	5.275.000	62
Juni	46.650.000	7.075.000	77
Juli	46.650.000	5.250.000	88
Agustus	46.650.000	1.200.000	91
September	46.650.000	1.650.000	94
Oktober	46.650.000	900.000	96
November	46.650.000	900.000	98
Desember	46.650.000	900.000	100
Jumlah	46.650.000	46.650.000	100

## b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2014–2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2014–2019:

Tabel 42. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2014-2019 Indikator 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2014	254.312.000	253.998.600	99,8
2015	422.850.000	422.040.000	99,8
2016	138.692.000	138.691.250	99,9
2017	228.391.000	228.391.000	100
2018	35.850.000	35.850.000	100
2019	46.650.000	46.650.000	100

## 8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBDbebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

## a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 8 adalah sebesar Rp 179.343.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBDbebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	179.343.000	179.343.000	100

Tabel 44. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	179.343.000	8.635.000	5
Februari	179.343.000	22.625.000	17
Maret	179.343.000	23.121.558	30
April	179.343.000	19.089.000	41
Mei	179.343.000	13.160.000	48
Juni	179.343.000	12.054.000	55
Juli	179.343.000	16.786.000	64
Agustus	179.343.000	15.093.000	73
September	179.343.000	16.516.000	82
Oktober	179.343.000	15.562.000	91
November	179.343.000	7.687.000	95
Desember	179.343.000	5.250.000	98
Jumlah	179.343.000	175.578.558	98

## b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2014–2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2014–2019:

Tabel 45. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2014-2019 Indikator 8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2014	254.312.000	253.998.600	99,8
2015	422.850.000	422.040.000	99,8
2016	138.692.000	138.691.250	99,9
2017	228.391.000	228.391.000	100
2018	297.884.600	297.884.600	100
2019	179.343.000	175.578.000	98

## 9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

### a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 9 adalah sebesar Rp.157.480.000,-.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019 :

Tabel 46. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Menurunnya penyakit menular langsung	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	157.480.000	153.862.691	97,7

Tabel 137. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	157.480.000	0	0
Februari	157.480.000	26.487.691	16,82
Maret	157.480.000	19.602.500	12,45
April	157.480.000	15.179.000	9,64
Mei	157.480.000	8.208.750	5,21
Juni	157.480.000	10.085.000	6,4
Juli	157.480.000	20.352.750	12,92
Agustus	157.480.000	10.128.000	6,43
September	157.480.000	4.271.000	2,71
Oktober	157.480.000	8.484.000	5,38
November	157.480.000	12.069.000	7,66
Desember	157.480.000	19.025.000	12,08
Jumlah	157.480.000	153.862.691	97,7

### b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2015 – 2019

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2015– 2019 :

Tabel 48. Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2015– 2019 Indikator 9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	117.581.000	111.527.800	94,85
2016	336.640.000	306.919.663	91,17
2017	253,953.000	252.065.000	99,26

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	96.205.000	93.505.000	97,19
2019	157.480.000	153.862.691	97,7

#### 10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

##### a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 10 adalah sebesar Rp 9.800.808.784,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 149. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	10.064.854.000	9.800.808.784	97,37

Tabel 50. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	8.792.450.000	466.704.927	5,31
Februari	8.792.450.000	655.406.914	7,45
Maret	8.810.660.000	797.438.417	9,05
April	8.810.660.000	718.398.906	8,15
Mei	8.810.660.000	1.312.336.368	14,89
Juni	8.810.660.000	993.739.144	11,28
Juli	8.810.660.000	1.115.653.309	12,66
Agustus	8.810.660.000	728.566.085	8,27
September	8.810.660.000	700.342.402	7,95
Oktober	10.064.854.000	787.848.643	7,83
November	10.064.854.000	810.735.214	8,06
Desember	10.064.854.000	713.638.455	7,09
Jumlah	10.064.854.000	9.800.808.784	97,37

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018–2019

Perbandingan pagu untuk indikator 10 hanya dapat dilakukan dalam dua tahun terakhir (2018-2019). Hal ini karena sebelum tahun 2018, indikator 10 ini belum ada.

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2018–2019 :

Tabel 51. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	10.407.068.000	9.537.899.564	91,85
2019	10.064.854.000	9.800.808.784	97,37

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 11 adalah sebesar Rp 157.277.000,-.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 52. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	157.277.000	153.763.706	97,77

Tabel 153. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	154.730.000	0	0
Februari	154.730.000	20.283.400	13,11
Maret	163.040.000	15.345.082	9,41
April	163.040.000	21.265.480	13,04
Mei	163.040.000	4.750.000	2,91
Juni	163.040.000	0	0
Juli	163.040.000	17.750.328	10,89
Agustus	163.040.000	19.860.000	12,18
September	163.040.000	20.377.058	12,50

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Oktober	157.277.000	9.028.358	5,74
November	157.277.000	19.254.000	12,24
Desember	157.277.000	5.850.000	3,72
Jumlah	157.277.000	153.763.706	97,77

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018–2019

Perbandingan pagu untuk indikator 11 hanya dapat dilakukan dalam dua tahun terakhir (2018-2019). Hal ini karena sebelum tahun 2018, indikator 11 ini belum ada.

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2018–2019 :

Tabel 54. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	205.000.000	201.751.571	98,42
2019	157.277.000	153.763.706	97,77

## 12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 12 adalah sebesar Rp 251.260.000,-.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2019:

Tabel 165. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasarana	251.260.000	247.329.700	98,43

Tabel 176. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Januari	221.260.000	0	0
Februari	221.260.000	0	0
Maret	251.260.000	0	0
April	251.260.000	66.859.300	26,61
Mei	251.260.000	114.537.200	45,58
Juni	251.260.000	0	0
Juli	251.260.000	29.713.200	11,82
Agustus	251.260.000	0	0
September	251.260.000	6.300.000	2,5
Oktober	251.260.000	29.920.000	11,91
November	251.260.000	0	0
Desember	251.260.000	0	0
Jumlah	251.260.000	247.329.700	98,43

## c) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018–2019

Perbandingan pagu untuk indikator 12 hanya dapat dilakukan dalam dua tahun terakhir (2018-2019). Hal ini karena sebelum tahun 2018, indikator 12 ini belum ada.

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2018–2019 :

Tabel 57. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018–2019 Indikator 12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	882.204.000	809.966.500	91,82
2019	251.260.000	247.329.700	98,43



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi kepada pimpinan (Direktur Jenderal) dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka dukungan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan.

Dari 12 indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja seluruhnya tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kegiatan KKP Kelas III Jambi pada tahun 2019 adalah 115,60%. Kegiatan pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara/wilayah selama tahun 2019 rata-rata mencapai target yang diharapkan bahkan ada kegiatan yang melebihi target. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa setiap alat angkut, barang dan orang yang keluar masuk *point of entry* harus diawasi untuk mencegah keluar dan masuknya penyakit menular dan potensial wabah, disamping kemungkinan meningkatnya kinerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan di tahun 2019 telah merealisasikan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Upaya realisasi kegiatan dan capaian indikator kinerja sebagai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Realisasi serapan anggaran sebesar 97,74%.

Realisasi capaian kinerja di tahun 2019 merupakan pembelajaran untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode-periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan

diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebesar sebesar Rp. 12.452.314.000,- dengan penyerapan dana kegiatan sebesar Rp. 12.170.580.909,- (97,74%). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIIJambi tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan struktur organisasi satuan kerja sehingga membutuhkan reviu dan revisi atas Rencana Aksi Kerja (RAK) 2015-2019 dan perjanjian kinerja guna penyesuaian.
2. Belum optimalnya kemampuan dan keterampilan petugas untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung perkantoran (wilker) maupun peralatan teknis lain.

## B. Tindak Lanjut

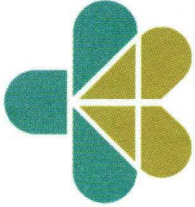
Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, diharapkan para Pelaksana Program lebih meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannya antara lain:

1. Melaksanakan reviu dan revisi terhadap RAK tahun 2015—2019 yang telah disusun sebelumnya menyesuaikan dengan struktur organisasi satker yang baru dan dengan memperhatikan SOTK terbaru Kemenkes RI dan perhitungan target kinerja dengan baik hingga tahun 2020. Serta melakukan revisi perjanjian kinerja yang telah dibuat sebelumnya dengan mengacu pada RAK tahun 2015-2019 yang telah direvisi.
2. Perlunya peningkatan SDM petugas melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan fungsional maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya yang diadakan oleh Ditjen P2P, PPSDM Kemenkes ataupun KKP

lainnya. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KKP itu sendiri.

3. Mengusulkan dan mengadakan kebutuhan sarana dan prasarana secara terus menerus dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Lebih meningkatkan jejaring kerja dengan lintas sektor dan lintas program.
5. Peningkatan anggaran kegiatan program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk menjadi kajian dan bahan telaahan serta bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan dalam menjalankan program-program di lingkungan KKP Kelas III Jambi di tahun yang akan datang.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah JAMBI 36139,  
Telepon : 0741-573432, Fax : 0741-571525  
Email : kkp.jambi@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
NOMOR : IR.2.02/1/ **1630** /2018

TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa kelancaran administrasi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi perlu adanya penetapan Tim Pengumpul Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Tim Pengumpul Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelabporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TENTANG TIM PENGUMPUL DATA CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR KESEHATAN  
PELABUHAN KELAS III JAMBI TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpul Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.
- KETIGA : Tim Pengumpul Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi bertugas terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan proses Pengumpul Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
  - B. Koordinator mempunyai tugas Mengawasi proses Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
  - C. Anggota Mempunyai Tugas :
    - 1. Mengumpulkan Data Capaian Indikator Kinerja

Kegiatan yang dibutuhkan per seksi setiap bulan.

2. Menginput Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Aplikasi E-Performance setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III JAMBI



**ALI ISHA WARDHANA**

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jambi di Jambi
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI di Jakarta
5. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P di Jakarta
6. Kepala KPPN Jambi di Jambi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN  
PELABUHAN KELAS III JAMBI.

NOMOR : IR.2.02/1/ /2018

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN  
RAK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS  
III JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPUL DATA CAPAIAN KINERJA KANTOR  
KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi  
Koordinator : KaSubBag Tata Usaha  
Anggota : 1. Siti Daniati, SKM (Staf Tata Usaha)  
2. Dewi Sukanti, SKM ( Staf PKSE)  
3. Wida Purwaningsih, SKM., M. Sc (Staf PRL & KLW)  
4. Siti Maimunah, Am. Kep (Staf PRL & KLW)

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III JAMBI,



**ALI ISHA WARDHANA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah JAMBI 36139,  
Telepon : 0741-573432, Fax : 0741-571525  
Email : kkp.jambi@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
NOMOR : IR.2.02/1/ 1631 /2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN RAK  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa kelancaran administrasi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi perlu adanya penetapan Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN RAK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2019.
- KETIGA : Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi bertugas terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan proses penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
  - B. Koordinator mempunyai tugas Mengawasi proses penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
  - C. Anggota Mempunyai Tugas :
    1. Menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam pertemuan evaluasi Desk SAKIP.
    2. Mengkompilasi data kegiatan seksi dalam bentuk LAKIP
    3. Membuat RAK 2015-2019.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III JAMBI



**ALI ISHA WARDHANA**

- Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jambi di Jambi
  2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
  3. Inspektur Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
  4. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI di Jakarta
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P di Jakarta
  6. Kepala KPPN Jambi di Jambi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN  
PELABUHAN KELAS III JAMBI.

NOMOR : IR.2.02/1/ /2018

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN  
RAK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS  
III JAMBI TAHUN 2019


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN RAK KANTOR  
KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi  
Koordinator : KaSubBag Tata Usaha  
Anggota : 1. Siti Daniati, SKM (Staf Tata Usaha)  
2. Dewi Sukanti, SKM ( Staf PKSE)  
3. Wida Purwaningsih, SKM., M. Sc (Staf PRL & KLW)  
4. Siti Maimunah, Am. Kep (Staf PRL & KLW)

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III JAMBI,



**ALI ISHA WARDHANA**